

**EKSISTENSI POLITIK ALIRAN
DALAM SISTEM DEMOKRASI MULTI PARTAI**

HASIL PENELITIAN BKD



**Peneliti:
ABDUL AZIZ, S.Pd.I, M.Si
NIP: 198007292009121004**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) WATAMPONE
2013**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN BKD
STAIN WATAMPONE 2013**

Judul Penelitian : EKSISTENSI POLITIK ALIRAN
DALAM SISTEM DEMOKRASI MULTI
PARTAI

Jenis Penelitian : Penelitian Terapan (*Applied Research*)
Kategori Penelitian : Penelitian Individual
Bidang Ilmu Peneliti : Ilmu Politik

1. Identitas Peneliti

- a. Nama : Abdul Aziz, S.Pd.I, M.Si
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIP : 198007292009121004
- d. Pangkat/Gol : Penata / IIIc
- e. Jabatan Fungsional : Lektor

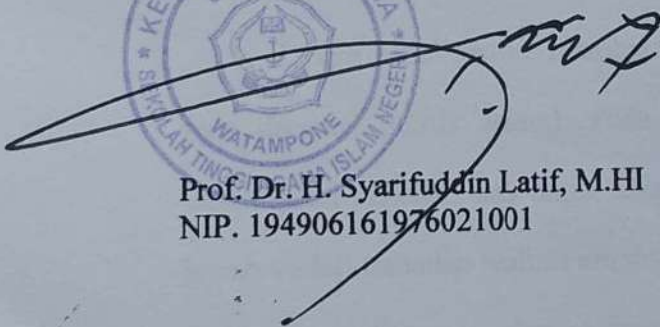
2. Lama Penelitian : Empat Bulan

3. Biaya Penelitian : Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)

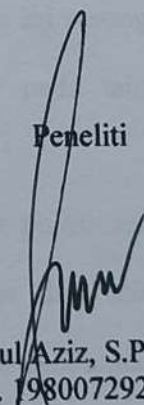
Watampone, 29 November 2013

Mengetahui

Ketua STAIN Watampone


Prof. Dr. H. Syarifuddin Latif, M.HI
NIP. 194906161976021001

Peneliti


Abdul Aziz, S.Pd.I, M.Si.
NIP. 198007292009121004

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penelitian Individual yang berjudul : “EKSISTENSI POLITIK ALIRAN DALAM SISTEM DEMOKRASI MULTI PARTAI” ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Demikian juga shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang utusan Allah sebagai pembawa kebenaran ilahiyah, sebagai rahmat bagi sekalian alam dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka pengembangan keilmuan dan pendalaman pemikiran peneliti khususnya, dan diharapkan dapat memberi warna pencerahan bagi mahasiswa dan segenap civitas akademika di STAIN Watampone, serta bagi siapa pun yang memiliki minat dalam kajian politik Islam Indonesia. Meskipun juga harus diakui, bahwa penelitian ini sesungguhnya tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban penelitian BKD pada tahun akademik 2013/2014.

Dalam penelitian ini membahas seputar dinamika politik aliran (termasuk pula dimensi politik Islam). Pada awalnya berangkat dari salah satu hasil kontemplasi peneliti, atau dapat dikatakan sebagai hasil pencermatan (tanggung jawab sosial) terhadap realitas empirik politik Islam di Indonesia dewasa ini. Dan dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa eksistensi politik aliran sebagai salah satu bentuk dialektika politik Islam selama ini secara perlahan mulai meredup seiring dengan berbagai persoalan yang melanda kehidupan partai politik, khususnya partai politik Islam.

Namun uniknya fenomena redupnya rezim politik aliran tidak serta merta menjadikan masa depan politik Islam di Indonesia kehilangan peran dalam kancah politik nasional. Sebaliknya politik Islam Indonesia mengalami penguatan peran dalam sistem demokrasi multi partai saat ini, meskipun menuai konsekuensi bahwa partai Islam tidak lagi menjadi representasi politik Islam (“Islam bukanlah partai Islam”) sebagai mana sebelumnya, karena wajah politik Islam Indonesia saat ini telah bermetamorfosis ke dalam representasi yang lebih luas terdiri dari: organisasi Islam, aktivis Islam, LSM Islam, dan partai politik Islam itu sendiri.

Penelitian ini tentu tidak terlepas sepenuhnya dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, peneliti selalu berharap adanya kritik, masukan, dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan penelitian ini, dan juga dapat menjadi bahan rujukan / perbandingan bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang penelitian ini.

Pada akhirnya peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua STAIN Watampone dan perencana anggaran yang telah mengalokasikan anggaran terbatas untuk penelitian ini, serta kepada semua pihak baik P3M maupun UPMA yang telah melaksanakan pengelolaan penelitian ini dengan cukup baik. Semoga apa yang telah dilakukan oleh semua pihak mampu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap penelitian ini mampu memberi manfaat kepada masyarakat, agama dan negara Indonesia.

Watampone, 29 November 2013
Peneliti

Abdul Aziz, S.Pd.I, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Landasan Teori.....	9
1. Teori Politik Aliran.....	9
2. Teori Ideologi dan Partai Politik	17
3. Konsepsi Demokrasi dan Demokratisasi	20
4. Konsepsi Demokrasi Multi Partai	23
E. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
3. Teknik Analisis Data	27
Bab II PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Perkembangan Demokrasi Multi Partai di Indonesia	30
1. Masa Sebelum Reformasi	30
2. Masa Sesudah Reformasi.....	32
3. Praktek Demokrasi Multi Partai Saat Ini	34
B. Pemudaran Politik Aliran Dalam Sistem Demokrasi Multi Partai.....	41
1. Fenomena Memudarnya Politik Aliran.....	41
2. Relevansi Memudarnya Politik Aliran Terhadap	

Kemerosotan Politik Partai Islam	43
3. Alur Penyebab Terjadinya Pemudaran	
Politik Aliran	45
a. Suburnya Penyakit Ideologis dan	
Elitis Partai Politik	45
b. Fenomena Kebangkrutan Politik Partai	47
c. Kerapuhan Lembaga Partai Politik dan	
Praktek Politik Berbiaya Tinggi	49
d. Perilaku Pemilih Rasional	51
1. Konsep Dasar Pemilih Rasional.....	51
2. Pemilih Rasional di Indonesia	52
3. Membangun Pemikiran Rasional	
Sebagai Pemilih.....	54
C. Eksistensi Politik Aliran dan Masa Depan Politik Islam Dalam	
Praktek Sistem Demokrasi Multi Partai.....	57
1. Masa Depan Politik Islam	58
a. Politik Islam Pasca Reformasi.....	58
b. Masa Depan Politik Islam	61
2. Peluang Konsolidasi Demokrasi	64

Bab III PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Refleksi	70

DAFTAR PUSTAKA

Bab I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berakhirnya sistem politik Orde Baru, dianggap membawa euforia. Peristiwa Mei 1998 dinilai telah membuka lebar-lebar pintu liberalisasi dan relaksasi politik. Dengan itu, publik politik Indonesia merasa terbebaskan dari belenggu kultural dan struktural yang sebelumnya menyulitkan dan membatasi mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional serta dalam melakukan kontrol sosial politik terhadap proses penyelenggaraan negara.

Perasaan terbebaskan inilah yang membentuk dan mempengaruhi kehidupan politik dewasa ini, yang sampai pada tingkat-tingkat tertentu sudah sangat berbeda dengan apa yang pernah berkembang di masa sebelumnya. Meskipun masih belum dapat disebut benar-benar demokratis, benih-benih kehidupan politik yang kompetitif telah mulai berkembang. Dalam konteks ini, yang sangat menonjol adalah demikian terbukanya kehidupan pers, dihormatinya hak untuk mengekspresikan pendapat, dan maraknya kehidupan partai-partai politik.

Maka dalam perspektif ini, partai-partai politik bermunculan jumlahnya tak pernah terbayangkan. Antara Mei sampai Oktober 1998, di tengah situasi yang serba tak menentu, yang ditandai oleh krisis ekonomi, politik, dan munculnya kekerasan di sana-sini, khususnya di kota-kota besar, dapat disaksikan lahirnya 181 partai politik, yang walaupun setelah melewati seleksi dan verifikasi oleh KPU, ternyata hanya 48 partai politik yang lolos dan dapat mengikuti pemilihan

umum 1999.¹ Namun fenomena tersebut telah melahirkan interpretasi yang sulit dihindari bahwa terdapat antusiasme politik yang sangat tinggi dalam masyarakat Indonesia pasca Soeharto.

Menjamurnya partai-partai politik terutama disebabkan oleh *political euphoria*, yang lebih merupakan ledakan emosi politik yang sudah tersumbat selama tiga puluh tahun lebih. Pada awal berkembangnya kehidupan partai politik belum mendapat respon dari pemerintah. Akan tetapi persoalan semacam itu cenderung dikesampingkan oleh siapa pun yang hendak mendirikan partai politik, sehingga grafik pendirian partai dari Mei 1998 sampai Februari 1999 mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Untuk yang kedua kalinya sistem politik Indonesia menganut kembali sistem multi-partai yang dapat dikatakan mempunyai kemiripan dengan generasi pertama partai-partai politik pada masa pergerakan kemerdekaan. Dikatakan mempunyai kemiripan, karena sebenarnya awal pertumbuhan partai politik masa reformasi telah dimulai sejak masa-masa akhir kekuasaan Orde Baru, hanya saja partai-partai tersebut mengambil pola gerakan yang tertutup yang pada akhirnya setelah reformasi resmi bergulir berubah menjadi gerakan terbuka. Apa yang dilakukan oleh para aktivis partai pada masa pergerakan kemerdekaan adalah untuk melawan dominasi kolonialisme pada waktu itu, mereka juga mengambil pola gerakan tertutup dalam melakukan mobilisasi rakyat, dan setelah kemerdekaan diproklamasikan berubah kepada gerakan terbuka.

¹ Bahtiar Effendy, "Teologi Baru Politik Islam", Yogyakarta: Galang Press, 2001, hlm 56.

Sedangkan perbedaan yang nampak dari kedua suasana tersebut adalah obyek perlawanan mereka masing-masing. Pada masa pergerakan, partai didirikan sebagai alat perjuangan untuk menentang kolonialisme Belanda yang nyata-nyata telah melakukan penghisapan dan pemiskinan terhadap seluruh struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nusantara. Sedangkan tujuan utama berdirinya partai-partai awal reformasi adalah untuk melawan penjajahan internal oleh Orde Baru yang dinilai telah melakukan proletarianisasi terhadap sebagian kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia.

Namun perkembangan jumlah partai pada waktu itu juga menimbulkan kecemasan-kecemasan masyarakat politik akan efek negatif dari banyaknya partai-partai tersebut. Kecemasan yang muncul dari berbagai kalangan menyimpulkan bahwa jumlah partai yang berlebihan justru akan membingungkan masyarakat. Tambahan pula, tidak tertutup kemungkinan partai-partai akan memecah belah masyarakat atas dasar agama, ras, garis etnik, garis kelas, dan lain-lain. Maka dalam melihat jumlah partai ini, ada berbagai pendapat yang berkembang di dalam masyarakat politik Indonesia dengan merujuk kepada peribatan bunga "biarkan bunga berkembang, akan layu sendiri karena seleksi alam". Pendapat seperti ini memberi arti bahwa tidak terlalu penting untuk membatasi jumlah partai politik, tetapi sebaliknya undang-undang tentang pemilihan umumlah yang harus diprioritaskan. Dengan kata lain bahwa pemilihan umum adalah ajang penentuan partai mana yang layak hidup berdasarkan pilihan rakyat.

Selanjutnya fenomena yang sangat menarik untuk diamati dari munculnya partai-partai tersebut adalah perkembangan aliran-aliran kepartaian sekarang yang menampakkan adanya sejumlah partai politik yang secara kultural maupun secara ideologis mempunyai ikatan/relasi yang sangat dekat dengan beberapa aliran partai politik atau pun kekuatan politik yang berkembang di masa lalu, baik yang berkembang di era Orde Lama maupun yang eksis di Era Orde Baru. Fenomena semacam ini memberi arti tersendiri dalam memaknai dinamika politik yang berkembang sekarang sebagai salah satu tolok ukur dalam memprediksi perjalanan demokratisasi di Indonesia,

Dari beberapa partai politik tersebut dari segi asas partai, program partai serta doktrin politiknya, bila dicermati dengan jelas masih mengusung jargon-jargon, credo-credo, atau pun semboyan-semboyan dari partai/kekuatan politik lama. Nampak sekilas gambaran tentang mereka adalah sebuah reinkarnasi dan perpanjangan tangan dari kekuatan-kekuatan politik masa lalu yang sedang menggeliat menyemarakkan pentas politik Indonesia kontemporer yang perlu untuk dipertanyakan mengenai visi dan orientasi politik mereka serta relevansi dan eksistensinya pada masa sekarang.²

Seiring dengan itu, format kepartaian, program-program partai, dan konsep mereka dalam memaknai dinamika politik Indonesia ke depan umumnya masih terasa ganjal, general, irasional, dan karena itu belum mencerminkan proses

² Kecenderungan penggunaan simbol-simbol politik tertentu juga nampak dalam kehidupan partai politik saat ini yang oleh partai politik dijadikan dasar legitimasi politik, khususnya yang terjadi pada parta-partai Islam. Lihat Muhammad Deden Ridwan dalam Nurcholis Madjid, *"Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani"*, Penyunting Muhammad Amin Akkas dan Hasan Muhammad Noer, Jakarta: PT Media Cita, 2001, hlm 230.

pendidikan politik yang sesungguhnya. Keberadaan beberapa partai politik baru itu tidak lebih dari hanya melanjutkan formasi sosial dan politik lama yang bertumpu pada garis primordialisme, komunalisme, dan politik aliran. Para politisi dari partai tersebut telah terjebak ke dalam romantisme masa lalu, yang bukan saja dapat menimbulkan kemungkinan bagi bangkitnya rasa sensitif terhadap golongan-golongan tertentu, tetapi lebih dari itu juga akan semakin mempertajam suasana dikotomik antar partai. Sehingga wajarlah bila timbul kecemasan dari sebagian kalangan masyarakat yang merasa risih dengan maraknya kehadiran partai-partai politik yang mengusung ideologi dari kekuatan lama.

Kelihatannya para elit partai politik tidak terlalu peduli dengan basis massa yang riil di tengah masyarakat, atau tidak berpikir mundur ke belakang (membangkitkan romantisme politik masa lalu). Misalnya kebangkitan politik Partai Nasional Indonesia (PNI) partai Soekarno, yang pada awal reformasi eksistensi partai tersebut diwakili oleh PNI Baru yang telah ikut serta dalam pemilu 1999. Selain itu, ada lagi partai yang dengan sangat jelas bertujuan membangkitkan kembali ajaran politik masa lalu, misalnya Partai Nasionalis Bung Karno (PNBK). Orientasi politik partai ini adalah untuk menghidupkan kembali ajaran marhaenisme-nya Soekarno yang merupakan cita-cita politik sang proklamator dikatakan digali dari dari struktur sosial asli bangsa Indonesia. Partai ini dapat digolongkan ke dalam kelas partai beraliran sosialis.

Sementara itu kelompok partai Islam (agama), Masyumi adalah contohnya. Eksis di era Orde Lama, Masyumi menjadi salah satu partai besar saat itu dan mempunyai reputasi yang cukup disegani di pentas politik negeri ini, yang

walaupun pada periode akhir pemerintahan Orde Lama merupakan sebuah partai terlarang dan para pemimpinnya dijebloskan kedalam penjara, akibat dituduh terlibat dalam pemberontakan Permesta. Sekarang kekuatan politik Masyumi selalu identik dengan Partai Bulan Bintang (PBB). Ada beberapa partai politik lagi yang dinilai sebagai simbol kekuatan politik tertentu di masa lalu.

Khusus untuk partai-partai Islam yang mempunyai kaitan sejarah dengan masa lalu, berbagai lontaran dan kritikan ditujukan kepada mereka. Kritikan itu berkaitan dengan ideologi partai dan idealisme para elit pendahulunya yang sangat fanatik terhadap Islam sebagai sebuah konstitusi dan wadah perjuangan politik yang sifatnya legalistik-formalistik. Dengan kata lain bahwa para elit pendahulu partai-partai Islam tersebut menginginkan terlaksananya syari'at Islam secara konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Lalu pertanyaan yang muncul dari para pengkritik ideologi partai-partai Islam tersebut adalah apakah para elit partai Islam sekarang akan bersikap sama dengan para pendahulunya, sehubungan dengan wadah perjuangan mereka yang juga tetap sama.

Seiring hal itu, juga terselip sebuah dugaan bahwa didirikannya suatu partai hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kucuran dana pemilu yang dianggarkan oleh pemerintah untuk masing-masing partai peserta pemilu. Keraguan ini menjadi sangat beralasan mengingat tingginya tingkat antusiasme para elit politik mendirikan partai tanpa merasa peduli terhadap signifikansi massa yang akan menjadi pendukungnya. Walaupun diakui adanya seleksi dan verifikasi sebagai syarat untuk lolos menjadi peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU,

namun tidak menutup kemungkinan kekhawatiran ini sebagai suatu kenyataan yang tidak disadari oleh publik. Sehingga akhirnya legitimasi eksistensi sebuah partai politik yang seharusnya lahir dari tingkat masyarakat akar rumput (*grass root*) pada kenyataannya hanya muncul dari legitimasi segolongan elit yang haus akan uang dan kekuasaan semata.

Keraguan tersebut di atas telah sepatutnya menjadi pertimbangan dalam mengukur perkembangan demokrasi dan konsolidasi kehidupan sosial politik di Indonesia yang sedang didambakan oleh masyarakat politik Indonesia sekarang ini. Rangkaian kekhawatiran dan keragu-raguan itu sebagiannya berujung kearah dilema sistem demokrasi multi partai yang dianut saat ini. Maka sangat menarik untuk membuktikan benar atau tidaknya keraguan-keraguan di atas lewat suatu kegiatan penelitian yang sistematis dan progresif.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk perkembangan sistem demokrasi multi partai di Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah alur penyebab terjadinya pemudaran politik aliran dalam sistem demokrasi multi partai pada era reformasi?
3. Bagaimanakah eksistensi politik aliran dan masa depan politik Islam di Indonesia dalam sistem demokrasi multi partai saat ini?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a) Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis realitas empiris persoalan eksistensi dan fenomena pemudaran politik aliran dalam sistem demokrasi multi partai saat ini, khususnya pada masa-masa awal reformasi sebagai tonggak lahirnya kehidupan multi partai. Hal ini dipandang sangat penting dalam rangka memperluas kajian mengenai eksistensi politik aliran dalam sistem demokrasi yang menjadi lingkungan kehidupan partai-partai politik (partai politik Islam) dalam memaknai dan merespon berbagai realitas politik Indonesia dewasa ini. Selain itu, juga terkait dengan peran dan kedudukan partai politik sebagai pilar demokrasi yang dominan, ikut menentukan pola interaksi antara negara dan masyarakat, dalam kapasitas partai sebagai agen sosialisasi politik bagi masyarakat.
- b. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui lebih mendalam relasi pemudaran politik aliran dengan realitas empiris kehidupan sosial politis masyarakat, khususnya seputar masa depan politik Islam dalam bingkai demokrasi multi partai saat ini. Dalam konteks implementasi sistem multi-partai di Indonesia saat ini, diperlukan pengkajian yang multi aspek mengenai prospek dari masing-masing partai, (khususnya partai-partai politik yang dianggap mempunyai relasi historis dengan kekuatan politik lama, maupun yang terkait dengan peran partai politik Islam) dalam

memaknai demokratisasi yang sedang berjalan saat ini, sehingga akan diperoleh gambaran tentang aspek pendukung dan aspek penghambat proses demokratisasi itu sendiri.

b) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap eksistensi dan fenomena pemudaran politik aliran dalam sistem demokrasi multi partai yang dianut Indonesia sekarang.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam menjelaskan eksistensi dan pemudaran politik aliran tersebut dalam kaitannya dengan masa depan politik Islam Indonesia dalam dinamika sistem demokrasi multi partai saat ini
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan khasanah ilmu politik pada khususnya dan bagi pendidikan politik masyarakat pada umumnya.
- d. Memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang berminat dalam bidang kajian ini.

D. LANDASAN TEORI

1. Teori Politik Aliran

Munculnya aliran politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan partai politik di negeri ini. Relevansi konsep politik aliran, yang terutama didasarkan pada pembagian Geertz tentang masyarakat Jawa, yakni

santri, abangan dan priyayi, ternyata bisa dilihat dari awal kemerdekaan hingga era orde lama. Dinamikanya terutama tercermin dalam konstelasi politik Indonesia sebelum dan sesudah pemilihan umum 1955. Pada era Orde Baru, politik aliran menurun ketika rezim otoriter mulai memperkenalkan sentralisasi kekuasaan dan memberlakukan pengawasan yang ketat untuk kegiatan partai politik. Adanya perubahan rezim dan munculnya era reformasi sejak tahun 1998, telah diikuti oleh kebangkitan politik aliran di negeri ini meskipun tampaknya sering digunakan untuk kepentingan pragmatis.

Secara historis pembahasan tentang politik aliran telah mengemuka sejak Herbert Feith dan Lance Castles (1970) mengelompokkan aliran-aliran politik yang berkembang sepanjang tahun 1945-1955 ke dalam lima aliran utama yaitu komunisme, nasionalisme radikal, sosialisme demokratik, tradisionalisme Jawa, dan Islam. Kelima aliran tersebut dikemukakan oleh keduanya masing-masing berada dalam pengaruh barat, tradisi Jawa-Hindu, dan tradisi Islam.

Pada awal kemerdekaan, orang Indonesia umumnya berpendapat bahwa hanya ada tiga aliran politik, yaitu Nasionalisme, Islam dan Marxisme yang menjadi tiga rumpun ideologi utama yang menaungi seluruh organisasi politik yang ada di Indonesia. Pengelompokan partai berdasarkan tiga aliran politik diatas, adalah, Partai agama atau yang disebut Islam diatas tadi, mencakup partai Protestan, partai Katolik serta partai Islam itu sendiri. Kemudian, partai-partai Marxis dalam kategori ini mencakup Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang mewakili tradisi sosialisme demokratis, serta Partai Murba. Kelompok partai nasionalis mencakup PNI yang nasionalis-radikal dan

Partai Indonesia Raya (PIR). Namun, setelah terbentuk koalisi dan status resmi pada ketiga golongan tersebut yaitu NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis), mengimplikasikan bahwa masih ada pengelompokan keempat, yaitu partai yang selain dari tiga pengelompokan tadi, seperti Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang termasuk partai-partai terlarang karena menentang ide Demokrasi Terpimpin. Selain alasan menentang Demokrasi Terpimpin, Masyumi tergolong partai-partai terlarang karena menolak berkerjasama dengan PKI dan menentang keras Komunis karena berideologi Islam sehingga menolak adanya NASAKOM.

Tetapi tidak dapat disangkal bahwa keempat partai yang secara ideologi jelas-jelas menonjol yaitu partai PNI, PKI, Masyumi dan NU, sebagai partai terbesar sewaktu Pemilihan Umum pada tahun 1955, hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya suara yang di dapat melebihi partai-partai lain mana pun, oleh karenanya mengakibatkan banyak orang beranggapan bahwa ideologi Indonesia terbagi menjadi empat. Akhirnya, terdapat dua aliran pemikiran yang terpenting, yaitu Tradisionalisme Jawa dan Sosialisme Demokratis, yang tidak terlalu terpancar dalam salah satu dari keempat partai utama tersebut, meskipun masing masing masih mendapat pengaruh dari aliran pemikiran politik Tradisionalis Jawa dan Sosialisme Demokratis. Berikut adalah kelima aliran pemikiran tersebut:

1. Komunisme

Komunis mengambil konsep-konsep langsung maupun tidak langsung dari Barat, sekalipun mereka menggunakan himbauan-himbauan abangan tradisional dan yang sejenis. Yang di maksud abangan tradisional disini di ambil dari teori Greetz

mengenai stratifikasi sosial berdasarkan kepercayaan yang ada pada masyarakat Jawa. Oleh karena itu dapat disimpulkan pula bahwa setiap aliran bersinggungan dengan aliran lainnya, hal ini dapat di lihat bahwa komunisme masih bersinggungan dengan aliran pemikiran Tradisonalis Jawa walaupun hanya sedikit, dan sangatlah bersebrangan dengan aliran pemikiran Islam. Hal ini dapat dilihat dari bagan yang di buat penulis dalam bukunya. Aliran ini muncul dalam Partai Komunis Indonesia (PKI).

2. Sosialisme Demokratis

Aliran Sosialis Demokratis juga mengambil inspirasi dari pemikiran barat tetapi aliran ini kurang berhasil dalam usaha menempatkan diri di kalangan massa. Walaupun kurang suara dalam pemilihan umum tetap saja tidak dapat dipungkiri bahwa Sosialisme Demokratis juga andil besar dalam pembentukan partai-partai yang beraliran lain, karena dapat mempengaruhi pemimpin partai tersebut terutama partai Masyumi dan PNI. Aliran ini muncul dalam Partai Sosialis Indonesia (PSI).

3. Islam

Aliran pemikiran Islam terbagi menjadi dua kelompok yang bertentangan yaitu Masyumi yang merupakan kelompok reformis yang aktif berpolitik yang mencakup aliran modernis maupun fundamentalis, hal ini dapat dilihat dari bagan yang dibuat oleh penulis bahwa masyumi lebih terpengaruh dengan aliran pemikiran Sosialis demokratis, sedangkan Nahdatul Ulama (NU) merupakan kelompok yang Tradisional dan konservatif (dan bersifat lebih Jawa), oleh karena

itu dapat dilihat dari bagan bahwa Nahdatul Ulama lebih terpengaruh dengan aliran pemikiran politik Tradisionalisme Jawa.

4. Nasionalisme Radikal

Aliran yang muncul sebagai respon terhadap kolonialisme, dari bagan yang di buat oleh penulis dapat dilihat bahwa aliran Nasionalisme Radikal lah yang mencakup kepada semua aliran baik Komunisme, Tradisionalisme Jawa, Sosialisme Demokrat dan Islam. Nasionalisme Radikal memiliki faktor yang dapat digunakan sebagai pemersatu rakyat dengan alasan aliran tersebut secara tidak langsung telah terikat dengan masing-masing aliran dan tidak memiliki aliran yang bersebrangan, seperti yang terdapat pada aliran komunis dan aliran Islam. Aliran ini berpusat pada Partai nasionalis Indonesia (PNI).

5. Tradisionalisme Jawa

Penganut tradisi-tradisi Jawa. Pemunculan aliran ini agak kontroversial karena aliran ini tidak muncul sebagai kekuatan politik formal yang kongkret, melainkan sangat mempengaruhi cara pandang para pemimpin-pemimpin partai yang menganut aliran lain. Memang benar tidak ada satu pun organisasi massa yang muncul untuk mendukung ide-ide ini. Hanya organisasi PIR (Partai Indonesia Raya), yang paling dekat mencerminkan ide-ide dari aliran Tradisional Jawa.³

Namun dikatakan oleh Daniel Dhakidae bahwa pembagian berdasarkan lima aliran seperti itu hampir hampir tidak dapat di pertahankan lagi pada masa sekarang. Komunisme telah sirna bersama dengan runtuhnya tembok berlin.

³ Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm 197. Lihat pula Clifford Geertz, *The Relegion of Java*, London, The Free Press, 1960, Terjemahan Aswab Mahasin, *Abangan, Santri, dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983), hlm 283-286.

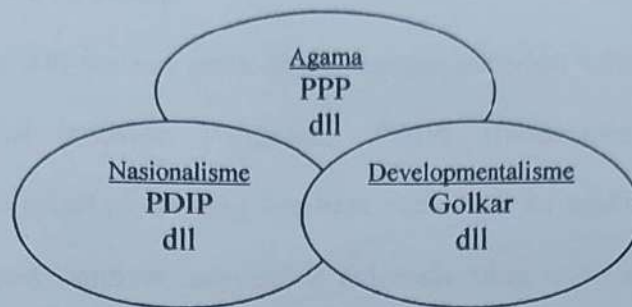
Kalaupun masih ada partai komunis di Rusia, Republik Rakyat Cina, dan Vietnam, maka semua partai komunis itu dikatakannya telah berganti kelamin dan hampir-hampir tidak dapat disebut partai komunis lagi. Malah cenderung disebut partai ultra-nasionalis dengan kesediaan adaptasi kepada tuntutan modal dan teknologi. Sedangkan aliran nasionalisme radikal sulit mempertahankan dirinya di tengah globalisme dengan tuntutan modal dan teknologi informasi.⁴

Selanjutnya Daniel Dhakidae mencoba mengelompokkan partai-partai politik era reformasi melalui dua jalur utama yaitu jalur kelas dan aliran. Partai yang mengambil jalur kelas membedakan dirinya dari yang lain berdasarkan pandangannya terhadap modal, yang pada akhirnya membagi masyarakat itu atas kelas pemilik modal dan kaum buruh dengan segala kompleksitasnya. Partai yang mengambil jalur aliran membedakan dirinya dari yang lain berdasarkan pandangannya terhadap dunia dan persoalannya.

Pengelompokan melalui jalur aliran akan mengkonfrontasikan antara partai yang mempunyai basis ideologi agama dengan partai yang berideologi nasionalisme kebangsaan. Sedangkan pengelompokan melalui jalur kelas akan mengkonfrontasikan antara partai yang bercorak developmentalisme di satu pihak dengan partai yang bercorak sosialisme radikal (marhaenisme) di pihak lain, seperti gambar berikut ini:

⁴ Daniel Dhakidae, *"Partai-Partai Politik Indonesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi Dalam Patahan-Patahan Sejarah"*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 1999.

Peta Aliran Kepartaian



Dari ketiga macam pengelompokan di atas, bila dilihat dari basis konstituennya yang riil di masyarakat adalah partai yang berideologikan agama sangat menarik untuk dicermati. Hal ini bukan hanya dikarenakan oleh latar belakang budaya bangsa Indonesia yang nota bene masih sangat teguh dalam memegang prinsip-prinsip keagamaannya, tetapi lebih dari itu bahwa pada masa kekuasaan Orde Baru yang telah melakukan “nasionalisasi” institusi-institusi agama dan tidak mentolerir sama sekali terhadap perbedaan, telah membuat kerinduan yang begitu mendalam bagi sekelompok masyarakat agama untuk memperjuangkan aspirasi politik mereka dengan memanfaatkan agama sebagai basis ideologi dalam merebut simpati massa.

Maka bila diperhatikan lebih lanjut, pemilihan dasar agama sebagai ideologi politik tidak semata-mata karena fanatisme para pendiri partai masing-masing. Akan tetapi, salah satunya karena alasan praktis yaitu bahwa agama apa pun akan dengan mudah menyatukan pendukungnya secara internal yang dilatarbelakangi oleh adanya persamaan keyakinan. Ini lebih merupakan terjemahan *politics of identity* ke dalam suatu struktur kepartaian. Kelompok Islam akan dengan mudah mengidentifikasi dirinya dengan umat Islam dan dengan

demikian dengan sendirinya akan mencari dukungan dari kalangan Islam, begitu juga dengan kelompok kristen.⁵

Di kutub lain muncul partai-partai dengan semangat kebangsaan seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Untuk meneropong basis konstituensi dari partai-partai yang beraliran nasionalis ini agaknya cukup sulit bila melihat kepada struktur masyarakat Indonesia yang multi etnik dan multi agama, sebab berdasarkan psikologi massa bahwasanya persamaan identitas agama dan etnik sering dijadikan landasan yang dominan dalam memilih partai politik. Belum lagi bila dihadapkan pada persoalan perpecahan partai atau munculnya partai sejenis yang memiliki kesamaan identitas, sehingga cenderung menimbulkan persaingan politik yang sangat tajam dalam suasana ketidakjelasan basis konstituensinya.

Sementara itu terdapat partai-partai yang mengambil posisi di antara kelompok agama dan kelompok kebangsaan dan di antara kelompok developmentalisme dan kelompok sosialisme radikal (marhaenisme) seperti yang diperankan oleh PAN dan PKB. Keduanya bukan partai agama, tetapi dengan kuat mendasarkan dirinya pada konstituensi agama. PAN menganut kombinasi dari keempat kelompok yang ada. Di sana juga ada unsur sosialis dan kebangsaan. Paham politik mereka tidak anti modal, tetapi modal harus diolah demi kepentingan sosial dan kepentingan rakyat banyak. Suatu paham yang lebih mirip *social market economy* hidup dalam PAN.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Partai-partai berdasarkan kelas adalah unsur baru dalam politik Indonesia dalam puluhan tahun terakhir. Bagaimana partai dengan asas kelas terbuka dan radikal menarik konstituensinya adalah sesuatu yang menarik untuk diamati. Partai berdasarkan kelas pada dasarnya sesuatu yang bersifat universal. Partai berdasarkan kelas sangat luas hubungannya ke samping. Namun untuk partai yang berdasarkan kelas dua hal berikut ini sangat menentukan; *Pertama*, adalah *labor size*, berapa besar jumlah kaum buruh Indonesia. *Kedua*, yang jauh lebih penting adalah kesadaran kelas itu sendiri (*class consciousness*) yang tidak tumbuh dengan begitu saja dan akan mendapat tantangan yang sangat berat. Para pekerja ini mungkin mendapat tali ikatan agama yang kuat. Mereka mungkin jauh-jauh lebih merasakan ikatannya dengan agama yang sekaligus mengadakan ikatan secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal melalui agama seseorang pekerja akan merasa senasib dan sepenanggungan dengan seorang konglomerat besar karena adanya ikatan keagamaan. Karena itu, tidak dengan sendirinya partai-partai dengan jalur kelas akan mudah mendapatkan dukungan meskipun konstituensinya bisa dirumuskan dengan jelas.⁷

2. Teori Ideologi dan Partai Politik

Menurut Maurice Duverger (1963), salah satu cara untuk melihat peranan ideologi di dalam kehidupan partai politik di Indonesia ialah dengan mempelajari konflik antara sesama partai politik khususnya, dan di antara keseluruhan kekuatan politik pada umumnya. Sehubungan dengan hal ini, ada tiga tipe konflik yang dikemukakan oleh Duverger: *Pertama*, ialah semua konflik yang sama sekali

⁷ *Ibid.*

tidak mempunyai dasar yang prinsipil. *Kedua*, ialah konflik yang timbul karena terdapat perbedaan mengenai bagian-bagian dari suatu prinsip, tapi tidak mengenai prinsip itu sendiri. *Ketiga*, ialah suatu konflik yang sama sekali bertolak dari suatu prinsip dasar.⁸

Bagi kehidupan kepartaian di Indonesia, amat tebalnya ikatan kepada ideologi lebih mempersukar kerja sama di antara para elit daripada mendorong terciptanya suatu konsensus. Sebab belum terdapat suatu ideologi yang mampu menyalurkan elit ke dalam suatu persetujuan yang mendasar mengenai politik, kenegaraan, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, ideologi yang diharapkan sebagai alat untuk menggerakkan masyarakat untuk menggapai suatu gambaran masyarakat yang dicita-citakan, justru membawa dampak yang terbalik. Masyarakat menjadi sukar digerakkan kepada suatu arah, walau Sukarno sekalipun dengan penafsirannya mengenai Pancasila, telah mencoba mengarahkan masyarakat Indonesia kepada penciptaan Indonesia sebagai pemimpin dunia.⁹

Mungkin pula, kelemahan peranan ideologi di dalam kehidupan partai politik berpangkal kepada penggunaan ideologi sebagai alat pengukur tingkah laku politik daripada memakai ideologi sebagai gambaran dari kehidupan manusia secara individual dan kelompok. Maka jadilah ideologi sebagai hukum yang menilai "benar dan salah", dan bukan sebagai kerangka pikiran mengenai susunan masyarakat yang penuh keterbatasan dan berada di dalam kemungkinan-kemungkinan.

⁸ Maurice Duverger seperti dikutip oleh Arbi Sanit, "*Sistem Politik Indonesia: Kestabilan-Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*", Jakarta: Rajawali Press, 1982, hlm 47.

⁹ *Ibid.*

Sikap dan pandangan ini kurang memberi kesempatan bagi usaha-usaha untuk menguraikan ideologi ke dalam rencana yang diukur dengan keperluan hidup sehari-hari. Lalu orang tetap berada di dalam pembicaraan yang abstrak daripada yang konkrit. Artinya sumber konflik masih berkisar pada perdebatan tentang bentuk dan tujuan negara, sementara masyarakat menunggu hasil konkrit di dalam bentuk keperluan hidup. Dengan demikian, barangkali yang diperlukan oleh partai politik di Indonesia ialah lebih banyak berusaha menafsirkan ideologi masing-masing ke dalam rencana operasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Amat mungkin dengan jalan itu partai masih bisa bertahan menghadapi perubahan politik di Indonesia. Sekaligus dengan usaha yang terakhir ini berarti pula mengalihkan sumber pertentangan di antara partai politik dari masalah ideologi kepada rencana operasional. Tindakan ini mempunyai dua keuntungan: *Pertama*, memperoleh intensitas konflik, sebab bagaimana pun juga pada tahap sekarang masyarakat memerlukan perbaikan kehidupan, yang bila dilihat dari sudut mana pun, hal itu tidak akan banyak berbeda. *Kedua*, partai bisa meningkatkan kemampuannya untuk melihat serta mengembangkan masyarakat melalui usaha nyata daripada yang abstrak.¹⁰

Selain itu, peranan ideologi dalam kehidupan partai politik di Indonesia dapat pula dilihat dari tipologi ideologi secara fungsional yang dapat dikategorikan ke dalam dua tipe yaitu ideologi yang bersifat doktriner dan ideologi yang bersifat pragmatis. Suatu ideologi dapat dikatakan bersifat doktriner apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumuskan secara

¹⁰ *Ibid.*

sistematis dan terperinci dengan jelas, diindoktrinasikan kepada warga masyarakat dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh fungsionaris partai. Sedangkan suatu ideologi dapat dikatakan bersifat pragmatis ketika ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terperinci, melainkan dirumuskan secara umum (prinsip-prinsipnya saja). Dalam hal ini, ideologi tidak diindoktrinasikan, tetapi disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama, dan sistem politik.¹¹

3. Konsepsi Demokrasi dan Demokratisasi

Secara etimologis demokrasi adalah gabungan dua kata yaitu *Demos* (masyarakat) dan *Kratos* (memerintah). Sedangkan secara terminologi demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat, namun pengertian yang sederhana tersebut pada kelanjutannya akan berkembang sesuai dengan konfigurasi politik yang terus berkembang seperti halnya pada abad ke 19 yang melahirkan paham demokrasi konstitusional yang kemudian berkembang menjadi negara hukum dan negara kesejahteraan *welfare state*.¹² Pada tataran negara demokrasi modern, Henry B. Mayo mendefinisikan: "sistem pemerintahan yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam

¹¹ Ramlan Surbakti seperti dikutip oleh Umaruddin Masdar dkk, "Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik", Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm 30.

¹² Information USA, Bureau of International Information Program, *What Is Democracy?*, Washington D.C, 2005, hlm.4. seperti dikutip oleh Zainal Muttaqin .wordpress.com/2009/08/20/.

pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.¹³

Sementara itu, transformasi ke arah demokrasi mengandung pengertian pergeseran dari suatu sistem nondemokratis (apa pun bentuknya) ke arah sistem yang demokratis. Namun dalam banyak pembahasan, transformasi ke arah demokrasi hampir selalu berkaitan dengan perubahan dari hubungan yang memiliki karakter *zero-sum*, dalam artian bahwa negara sangat kuat dan masyarakat sipil sangat lemah, menjadi hubungan yang berkarakter *positive-sum*. Dengan pengertian seperti ini maka diperlukan strategi dan taktik untuk meningkatkan kekuatan masyarakat sipil sehingga memiliki *bargaining position* yang lebih kuat. Sementara itu, beberapa ahli menggunakan istilah *people empowering* (perberdayaan rakyat) untuk strategi dan taktik meningkatkan nilai tawar masyarakat. Pemberdayaan rakyat dilakukan melalui liberalisasi dan demokratisasi (O'Donnell, 1988).¹⁴

Liberalisasi merupakan proses untuk mendefinisikan kembali, memperluas dan menjamin hak-hak individu dan kelompok-kelompok sosial dari kesewenang-wenangan dan tindakan-tindakan ilegal, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh pihak ketiga. Dalam tingkatan individu, jaminan-jaminan ini meliputi elemen-elemen klasik tradisi liberal seperti hak untuk diperiksa di depan pengadilan, hak untuk didampingi oleh pembela dalam suatu perkara pengadilan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, kebebasan untuk mengadakan suatu

¹³ Henry B. Mayo, *an Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960, hlm.70. seperti dikutip oleh Zainal Muttaqin wordpress.com/2009/08/20/.

¹⁴ Awan S. Dewanta dalam Riza Noer Arfani, “*Demokrasi Indonesia Kontemporer*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 277-279.

pergerakan, berbicara dan petisi serta sebagainya. Pada tingkatan kelompok, meliputi misalnya bebas dari hukuman untuk menyatakan ketidakpuasan kelompok terhadap kebijakan pemerintah, bebas dari penyensoran terhadap sarana-sarana komunikasi, serta kebebasan untuk berserikat secara sukarela dengan warga negara yang lain.

Sedangkan demokratisasi menunjuk pada proses untuk menerapkan aturan-aturan dan prosedur kewarganegaraan dan lembaga-lembaga politik. Sebelum proses tersebut, prinsip-prinsip pendukung (seperti pengawasan yang koersif, tradisi sosial, penilaian para ahli ataupun praktek-praktek administrasi) perlu dilakukan. Prinsip-Prinsip pendukung tersebut diperluas hingga mencakup orang-orang yang belum memperoleh hak dan kewajiban semacam itu (misalnya warga negara yang tidak membayar pajak, yang buta huruf, etnis minoritas dan lain-lain), dan juga mencakup lembaga-lembaga yang belum memperoleh partisipasi warga negara (misalnya badan-badan militer, organisasi-organisasi partisan, asosiasi-asosiasi kepentingan, lembaga-lembaga pendidikan dan lain-lain).

Kedua proses ke arah demokratisasi tersebut mengasumsikan adanya polarisasi orientasi di tingkat negara (elit) dalam kaitannya dengan usaha untuk mempertahankan kekuasaan, maupun di tingkat masyarakat dalam kaitannya dengan cara-cara pencapaian demokrasi. Di tingkat negara, elit terpolarisasi menjadi dua kelompok yakni kelompok reformis yang menghendaki terjadinya pembukaan akses menuju kekuasaan dan kelompok garis keras yang menginginkan status quo. Sedangkat dalam tingkat masyarakat, polarisasi yang

ada menghasilkan kelompok radikal yang menghendaki perubahan radikal kepada suatu sistem yang demokratis dan kelompok moderat yang meskipun menginginkan tetapi dengan cara yang normal.

4. Konsepsi Demokrasi Multi Partai

Wacana partai politik dalam tatanan negara demokrasi kontemporer merupakan hal yang sudah lama berkembang sebagai sebuah parameter dari negara yang menganut sistem demokrasi, hal ini ditegaskan oleh Michael I. Urofsky,¹⁵ yang menyatakan bahwa terdapat parameter negara demokrasi antara lain:

1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi
2. Pemilihan umum yang demokratis
3. Federalisme, pemerintahan negara bagian dan lokal (distribusi kekuasaan)
4. Pembuatan undang-undang
5. Sistem peradilan yang independen
6. Kekuasaan lembaga kepresidenan
7. Peran media yang bebas
8. Peran kelompok-kelompok kepentingan
9. Hak masyarakat untuk tahu
10. Melindungi hak-hak minoritas
11. Kontrol sipil atas militer.

Penyebutan pemilihan umum yang demokratis dalam parameter tersebut mengindikasikan bahwa dalam pemilihan umum tentu tidak terlepas dari adanya

¹⁵ Michael I Urofsky, *Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi*, dalam "Demokrasi", Office of International Information Programs U.S. Department of State, t.th., hlm. 2-6. seperti dikutip oleh Zainal Muttaqin [.wordpress.com/2009/08/20/](http://wordpress.com/2009/08/20/).

sistem kepartaian yang dianut oleh negara demokrasi. Partai politik secara mendasar adalah sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan dari masyarakat yang memiliki tujuan yang sama yang kemudian bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut.¹⁶ Oleh karena itu dalam sebuah negara demokrasi partai politik sebagai sebuah lembaga memiliki peranan yang penting. Pada awalnya partai politik seperti yang diutarakan oleh Joshep Lapalombara memiliki tiga pengertian yang antara lain:¹⁷

1. Teori kelembagaan, yaitu yang mengartikan bahwa terdapat hubungan antara parlemen dan timbulnya partai politik
2. Teori situasi historis yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas.
3. Teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Seiring dengan pemaknaan partai politik di atas, maka terdapat juga perkembangan wacana dalam sistem kepartaian. Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Maurice Duverger,¹⁸ menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai, dan sistem banyak partai. Pada perkembangannya

¹⁶ Lawson, *Political Parties*, Microsoft Encarta, Microsoft Corporation, Redmond WA, 2008. seperti dikutip oleh Zainal Muttaqin .wordpress.com/2009/08/20/.

¹⁷ Joshep Lapalombara, Myron Weiner, *The Origin and Development of Political Parties*, Princeton University Press, Princeton, 1966, hlm. 7. seperti dikutip oleh Zainal Muttaqin .wordpress.com/2009/08/20/.

¹⁸ Maurice Duverger, *Political Parties: Their Organization and Activities in Modern State*, Methuen, London, 1967, hlm.207. seperti dikutip oleh Zainal Muttaqin .wordpress.com/2009/08/20/.

saat ini banyak negara di dunia sudah mulai menerapkan sistem banyak partai atau multipartai sebagai sebuah refleksi dari kemerdekaan bertindak dan berekspresi yang banyak diakomodir dalam banyak konstitusi di negara-negara yang menganut demokrasi. Sebagai contoh misalnya di Indonesia dengan berlakunya UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang memberikan sebuah kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai sebuah bentuk kebebasan berekspresi dan bertindak sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Data diperoleh melalui observasi partisipan dan studi literatur terhadap berbagai sumber pengkajian dan analisis, sehingga peneliti memperoleh informasi mengenai masalah empiris yang hendak dipecahkan.

Metode ini memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual, dan kategoris dari data itu sendiri, baik dari teknik-teknik yang telah terkonsep maupun dari teknik-teknik yang tidak dikonsepsikan sebelumnya. Metode penelitian ini diambil karena memiliki beberapa kelebihan seperti memandang perilaku berdasarkan latar yang lebih alamiah, pemahaman yang lebih mendalam serta lebih luwes yang dapat menemukan hal-hal yang tak terduga.

Dengan metode seperti ini, maka tipe penelitian yang digunakan menjadi bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memecahkan atau

menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang dengan menyelidiki fenomena dalam konteks implementasi nyata, batas antara fenomena dan konteks tak tampak tegas serta memanfaatkan multi sumber. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif melalui serangkaian langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi data, serta akhirnya pengolahan data dan analisis data.

Di samping itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian eksploratif, dimana penelitian ini pada dasarnya bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum memiliki hipotesa. Melalui penelitian ini, masalah penelitian dapat dirumuskan dengan jelas dan lebih terperinci serta dapat dikembangkan. Tujuannya adalah bukan menguji teori akan tetapi mencoba membangun suatu teori setelah melakukan pengujian empiris di atas dasar teori yang sudah mapan.

Dengan metode deskriptif-eksploratif, peneliti hendak mengungkapkan serta menjelaskan Eksistensi Politik Aliran Dalam Sistem Demokrasi Multi Partai. Selain itu, metode historis juga akan digunakan sebagai pelengkap untuk memahami dinamika aliran politik kepartaian yang berkembang semenjak dari era Orde Lama sampai pada era reformasi. Dengan demikian penelitian ini hendak menguji suatu fenomena sosial politik yang dinamis.

Salah satu penelitian deskriptif menurut Mohammad Nazir (1988) adalah studi kasus, yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan persoalan.¹⁹ Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.

¹⁹ Mohammad Nazir, "Metode Penelitian", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus atau status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat yang khas tersebut akan dijadikan hal yang umum.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan mengungkap Eksistensi Politik Aliran Dalam Sistem Demokrasi Multi Partai. Untuk mengungkap permasalahan secara menyeluruh dari data-data yang dicari dan diperoleh, baik melalui observasi di lapangan, ataupun dari sumber-sumber tertulis yang dianggap valid.

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam hal ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), penelusuran secara literasi di internet, maupun melalui penelusuran dokumen resmi dan tidak resmi, hasil seminar, berita-berita media massa, buku-buku literatur, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen/catatan yang dikeluarkan oleh suatu institusi partai politik, para aktivis partai, wawancara para tokoh partai politik dengan media massa, artikel para analis, dan lain-lain. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah tokoh dan pengamat yang dianggap menguasai permasalahan yang hendak dibahas, dengan catatan wawancara dilakukan bila dianggap perlu, dan jika data yang telah ada dianggap belum memadai namun telah mencapai titik jenuh. yang telah ditetapkan.

3. Teknik Analisis Data

Analisis dimulai sejak proses pengumpulan data berlangsung, dimana setiap informasi dan data yang ditemukan akan di-*cross check* dengan komentar

responden yang berbeda untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat dan obyektif. Selanjutnya data akan dikategorisasikan ke dalam beberapa kategori yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya analisis dilakukan melalui penyaringan data, pengolahan data, penyimpulan serta uji ulang setiap interpretasi logis. Data yang terkumpul akan disaring dan disusun ke dalam kategori-kategori, selanjutnya akan saling dihubungkan dari berbagai sumber dan variabel yang berbeda. Melalui proses inilah penyimpulan dibuat dengan tujuan untuk memperkokoh dan memperluas bukti yang dijadikan landasan, pengujian juga dilakukan terhadap interpretasi bab-bab sebelumnya dalam suatu kerangka uraian logis dan kausalistik untuk memperkokoh bukti penguat kesimpulan dari beberapa sumber.

Dengan kata lain, analisis data dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu triangulasi dan interpretasi. Metode triangulasi pada dasarnya berpijak pada validitas temuan-temuan, dan tingkat kepercayaan akan tinggi dengan pemakaian lebih dari satu teknik pengumpulan data. Menurut Maleong (1990), metode ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian interpretatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan makna serta analisis terhadap obyek-obyek, peristiwa, dan tindakan aktor. Metode ini berusaha mencari makna secara luas dan mendalam atas tindakan sosial obyektif dengan cara berempati terhadap agen

²⁰ Maleong, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.

yang melakukan aksi dalam masyarakat, baik yang berupa ekspresi bahasa ataupun aktifitas dan perilaku yang lain.

Bab II

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. PERKEMBANGAN DEMOKRASI MULTI PARTAI DI INDONESIA

Perkembangan sistem demokrasi multi partai di Indonesia dapat dipahami dengan menelusuri jejak kehidupan demokrasi dan partai politik sebelum masa reformasi dan setelah masa reformasi, terutama praktek empiris sistem demokrasi multi partai di era reformasi:

1. Masa Sebelum Reformasi

Perkembangan sistem kepartaian di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, yang dapat dikategorikan dalam beberapa masa yang dimulai sejak masa Hindia Belanda. Keberadaan Partai Politik di Indonesia dimulai sejak Pemerintah Hindia Belanda mencanangkan Politik Etis pada tahun 1908. Dengan adanya Politik Etis ini, maka banyak kalangan cerdik pandai kaum Bumiputera yang mulai tergerak untuk ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui berbagai organisasi kemasyarakatan. Pelopor utama dari Organisasi kemasyarakatan tersebut adalah Boedi Oetomo.

Adapun setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, Indonesia menganut sistem Multi Partai yang ditandai dengan munculnya 24 Partai Politik yang berbasis Aliran (ideologi). Menjelang Pemilu tahun 1955 yang berdasarkan Demokrasi Liberal terdapat 70 Partai Politik yang mengambil bagian dalam Pemilu tersebut. Perlu diketahui bahwa Pemilu tahun 1955 dipergunakan untuk memilih anggota

Konstituante yang bertugas untuk merumuskan UUD yang akan menggantikan UUDS 1950, dan memilih DPR.²¹

Pada Tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 9 Partai Politik yang mendapat pengakuan, yaitu PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katolik, Perti, Murba, dan Partindo. Dengan berkurangnya jumlah Partai Politik tersebut, tidak berarti konflik ideologi dalam masyarakat umum sebagai akibat pengaruh yang dibawa oleh Partai-partai Politik tersebut menjadi berkurang. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 Desember 1964, di Bogor diselenggarakan pertemuan Partai-Partai Politik dan menghasilkan Deklarasi Bogor. Tanggal 12 Maret 1966 setelah terjadi Pemberontakan G/30/S PKI, maka PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai Partai terlarang di Indonesia.²²

Kemudian dimulailah usaha pembinaan Partai-partai Politik yang dilakukan oleh Orde Baru. Tanggal 20 Pebruari 1968 didirikan Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) sebagai langkah peleburan dan penggabungan ormas-ormas Islam yang sudah ada, dan yang belum tersalurkan aspirasinya. Pendukung dari Partai ini adalah Muhammadiyah, HMI, PII, Aliwasliyah, HSBI, Gasbindo, PUI dan IPM). Tanggal 27 Pebruari 1970, Presiden Soeharto mengadakan konsultasi dengan Partai-partai Politik, guna membahas gagasan untuk mengelompokkan Partai-partai Politik yang ada di Indonesia, dan kemudian berujung pada kebijakan penyederhanaan partai politik ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan

²¹ Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, Get II, CSIS, Jakarta, 1982, hlm 190.. dalam Zainal Muttaqin .wordpress.com 20 Agustus 2009.

²² *Ibid*

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta ditambah dengan Golongan Karya (Golkar).²³

2. Masa Sesudah Reformasi

Beralih kepada masa setelah Orde Baru, dengan adanya semangat reformasi yang diikuti pula dengan bergulirnya demokrasi untuk keluar dari rezim yang super represif dan otoriter maka pergulatan sistem kepartaian dan partai politik menjadi hal yang sangat signifikan, hal ini ditandai dengan lahirnya sejumlah partai politik sebagai sarana saluran dan ruang untuk berdemokrasi.

Sejalan dengan dinamika politik terutama sejak bergulirnya masa reformasi, yang diawali dengan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, upaya pengaturan partai politik terus dilakukan, yang berarti penataan kembali legislasi partai politik dengan membentuk undang-undang partai politik yang baru merupakan keharusan yang tidak mungkin dihindari.

Dimulai sejak awal tahun 2008 mulai berlaku undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menggantikan undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Alasan penggantian tersebut antara lain belum optimalnya UU No 31 Tahun 2002 tersebut dalam mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Undang-undang No 2 Tahun 2008 diharapkan pula pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan parpol, yang menyangkut demokratisasi internal parpol, transparansi dan

²³ *Ibid*

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan parpol, peningkatan kesetaraan jender dan kepemimpinan parpol dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

Diantara substansi UU No 2 Tahun 2008 yang menarik ialah ketentuan mengenai pembentukan parpol yang kemudian mengokohkan kembali sistem multipartai yang telah diatur sebelumnya. Satu hal yang terpenting dari infrastruktur politik dalam negara demokrasi ialah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.²⁴

Perubahan regulasi yang menempatkan partai politik sebagai “organisasi nasional” diharapkan dapat mengubah paradigma politik sekelompok kecil masyarakat yang gemar mendirikan partai politik dan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan warga negara mendirikan partai dengan menetapkan persyaratan yang lebih ketat. Persyaratan dimaksud antara lain melalui ketentuan mengenai “pembentukan partai politik” serta organisasi dan kedudukan “partai politik”. Dengan demikian para deklarator politik harus benar-benar berusaha memperoleh dukungan publik secara nasional sebelum pembentukan partai diumumkan.

Kemudian juga pendaftaran partai politik ke Departemen Hukum dan HAM untuk memperoleh status sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) mengharuskan partai politik menempuh proses penelitian dan verifikasi kelengkapan dan kebenaran semua keterangan dalam anggaran dasar yang tercantum akta notaris dan persyaratan lain yang diperlukan untuk menetapkan

²⁴ Oka Mahendra, *Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Tanpa penerbit, Jakarta, 2005, hlm.232. dalam Zainal Muttaqin .wordpress.com 20 Agustus 2009.

status partai sebagai badan hukum.²⁵ Regulasi yang lebih ketat tersebut mungkin berdasarkan pengalaman sebelumnya tentang banyaknya kelompok masyarakat yang mengajukan pendaftaran partai politik. Pada tahun 2003 terdapat 112 partai politik yang mendaftar di Departemen Hukum dan HAM untuk diverifikasi 84 diantaranya memenuhi syarat diverifikasi, dan dari 84 partai politik tersebut hanya 50 yang memenuhi syarat untuk disahkan sebagai badan hukum.²⁶

3. Praktek Demokrasi Multi Partai Saat Ini

Salah satu kelemahan utama partai politik setelah masa reformasi adalah karena tidak pernah berperan sebagaimana fungsinya sebagai partai politik. Partai politik hanya semata-mata muncul kurang lebih menjadi "broker" bagi para elite partai atau siapa saja untuk menaiki tangga kekuasaan. Hal ini, bisa terjadi karena kesalahan lahir. Ketika muncul UU politik baru yang memberi kebebasan berdirinya partai baru, rata-rata partai yang berdiri orientasinya hanya kekuasaan. Bagaimana mengganti presiden yang dikatakannya "transisi" dan "statusquo", kemudian menduduki kursi kepresidenan dan membagi-bagi jabatan menteri-menteri. Mereka mendirikan partai untuk memenuhi syarat administratif saja, "platform" partai yang muluk-muluk hanya selesai di atas kertas. Terkabul, ketika para pimpinan partai itu akhirnya bisa berkuasa dan menduduki jabatan penting, maka selesailah tugas partai itu.

Rata-rata partai tidak melakukan lagi konsolidasi internal yang ketat. Perhatikan, jika ada muktamar, kongres, maka yang menonjol sampai sekarang hanya perebutan jadi pimpinan partai, bahkan kalau perlu lahir pengurus kembar.

²⁵ UU. No.2 Tahun 2008 Pasal 2 dan Pasal 11.

²⁶ Oka Mahendra, Op.Cit., hlm.234.

Jarang partai yang melakukan fungsi pendidikan politik pada kader. Tidak ada "*political socialization*", atau memelihara konsensus dalam masyarakat mengenai program dan cita-cita partai yang mungkin sedang berkuasa. Bandingkan partai-partai yang didirikan sebelum pemilu 1955. Partai-partai dibentuk dengan kohesi berbagai ideologi dan agama yang jelas dan solid, seperti Islam, nasionalis, sosialis, komunis, katholik, kristen serta dipimpin oleh tokoh yang kharsimatik yang sudah malang melintang dalam gerakan politik sebelum Indonesia merdeka.

Sekarang, kegiatan partai yang menonjol dan sangat dominan, hanyalah fungsi partai sebagai "*mobilization of voters*", baik menghadapi pemilu nasional yang lalu maupun dalam pilkada gubernur dan kepala daerah. Dalam pilkada, bahkan partai seperti kehilangan inisiatif. Yang muncul pertama kali adalah inisiatif para calon, partai kemudian dikendalikan oleh para calon yang punya uang dan punya kharisma. Partai hanya memberikan stempel dan legitimasi yang bukan tidak mungkin melalui tawar-menawar materi. Itulah sebabnya banyak muncul calon ganda dari satu partai, atau calon yang sebenarnya tidak terpuji dalam masyarakat, melenggang jadi calon.

Selanjutnya persoalan "*political recruitment*" internal dalam partai dari pusat sampai daerah. Partai tidak pernah melakukan pemilihan dan pengerahan calon pemimpin yang betul-betul sesuai aspirasi partai, loyal dan handal. Para calon partai dalam pilkada, hanya calon yang datang karena merasa punya uang, atau mereka sudah terlanjur punya akses yang kuat dalam partai. Jika ada konvensi partai, hanya dilakukan asal-asalan, tanpa kreteria dan sosialisasi yang cukup. Singkat kata, calon dan pengurus partai seperti jika hanya "ketemu di

jalan", dua orang kebetulan bertemu di pasar, katakanlah antara seorang penjual dan seorang pembeli.²⁷ Karena itu, jika demokrasi sekarang ini hanya mengandalkan partai sebagai satu-satunya katalisator demokrasi, resikonya demokrasi kita menjadi "demokrasi elitis transaksional", dan tidak lebih hanya sebuah "demokrasi pasar".

Lain dari sistem politik Anglo saxon yang biasanya di dominasi 2 partai politik kuat sehingga yang kalah akan menjadi oposisi untuk mengimbangi partai berkuasa (*ruling party*), Indonesia sebaliknya menganut sistem multi partai. Konsekuensi dari sistem politik ini adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat yang didukung parlemen diperlukan koalisi partai politik yang mempunyai platform yang sama. Setelah kejatuhan Soeharto sangat dirasakan betapa Indonesia memerlukan pemerintahan yang kuat, tetapi sistem multi partai tidak membuka kesempatan untuk suatu partai mendominasi hasil Pemilu, sebagai konsekuensi logis dari keadaan ini tidak lain harus ada koalisi partai-partai politik yang mempunyai platform yang sama. Secara tradisi partai-partai politik di Indonesia sejak Pemilu pertama 1955 terdiri dari partai politik dengan platform nasionalis, agama dan sosialis.

Praktek *money politics* malahan menjadi duri dalam daging dalam setiap pergelaran Pemilu dan terasa sangat memalukan karena ditengah tuntutan memerangi korupsi dan pembentukan pemerintahan yang efisien dan kuat yang menjadi isu paling panas bagi rakyat Indonesia ada saja partai politik yang mengotori setiap Pemilu dengan *money politics*, jualan paradigma baru, padahal

²⁷ Us Tiarsa R, *Sistem Multi Partai*, dalam Putut Joko Utomo blogspot.com/2011/05/.

adalah produk lama tetapi kemasan baru. Bahkan ada partai yang menawarkan untuk tetap setia menjadi pengikut Soeharto, suatu tawaran yang tidak logis dan menghina intelegensia rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah diulas di atas, rakyat semakin rasional dalam memilih partai dan pemimpin, yang direfleksikan dalam keberanian berpindah memilih partai yang mengecewakannya yang merupakan angin segar dalam proses demokratisasi di Indonesia. Keberanian berpindah pilihan (*swing voters*) akan berdampak positif bagi kehidupan demokrasi karena para pemimpin kedepan tidak berani seenaknya mempermainkan komitmen kepada rakyat dengan janji janji kosong, karena akibatnya akan dihukum dalam Pemilu berikutnya. Semoga dalam panggung politik akan terjadi persaingan ketat para pemimpin dan politisi untuk memenuhi janji dan memperjuangkan nasib rakyat.

Adapun tentang partai oposisi (*the party in opposition*) tidak bisa lepas dari kultur-sistem politik, terutama sistem-kultur kepartaian (*party-system*) yang dianut (berlaku) di suatu negara. Hakekat dalam adanya partai oposisi, adalah adanya pengakuan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Terutama tentang *power* (kekuasaan) yang melibatkan nasib bangsa (masyarakat), itu perlu kultur-sistem *checks & balances*. "*Power tends to corrupt -- absolute power corrupts absolutely*", kata Lord Acton. "*History is past politics -- present politics future history*", kata Sir John Seely. Ada dua kemungkinan kepemimpinan politik dalam sistem politik yang tidak mengakui (mengenal) adanya partai oposisi; "Ratu Adil",

atau diktator-tiran! *Checks & balances*, itulah salah satu substansi demokrasi modern.²⁸

Adanya partai oposisi melekat kuat dengan sistem dua partai (*two-party system*) dan sistem banyak partai (*multi-party system*), bukan dengan "sistem satu partai" ("*one party system*") yang *contradictio in terminis* dan otoriter-totaliter. Kedua sistem dua partai dan sistem banyak partai sama-sama mensyaratkan adanya partai oposisi (*the party in opposition*) secara jelas dan tegas serta lugas, kalau tidak begitu maka pada hakikatnya sama saja dengan "sistem satu partai" meskipun bisa saja terdapat jumlah (struktur, format) lebih dari adanya hanya satu partai.

Dalam demokrasi semu bisa terjadi, formalnya berlaku sistem banyak partai tapi faktual-aktualnya berlaku "sistem satu partai" tanpa adanya *checks & balances*. Adanya partai oposisi di negara-negara demokratis-modern bukan hanya lumrah tapi harus; oposisi adalah bagian dari partisipasi, tidak ada partisipasi berarti tidak ada demokrasi! Tugas partai oposisi tidak kalah penting dibanding dengan tugas partai pemerintah (*the party in power*).

Contoh-contoh di Inggris, Kanada, Australia ketua partai oposisi merupakan jabatan yang penting dan terhormat serta diberi uang kehormatan oleh negara. Menjalankan tugas oposisi tidak sama dengan secara membabi buta (hantam kromo) melakukan sabotase dan/atau subversi. Oposisi politik ada aturan mainnya (bukan teror politik!). Beroposisi politik berarti secara lugas-jelas-tegas melakukan kontrol, koreksi, kritik terhadap pemerintah demi kepentingan

²⁸ *Ibid*

publik.²⁹ Baik partai pemerintah maupun partai oposisi sama-sama adalah partai politik yang legal, yang eksistensi-fungsinya sama-sama dijamin undang-undang dan kebiasaan (konvensi-tradisi) politik negeri. Rezim yang menutup pintu untuk adanya partai oposisi, bisa berarti membuka jendela untuk adanya konspirasi (komplotan), *rebelli*, *putsch*, *coup d'etat*, dan bahkan revolusi. Hakikat manusia dan kebebasan, selalu mencari celah untuk bebas (bukan liar).

Dalam rezim otoriter-totaliter yang mempraktikkan "sistem partai tunggal" (dengan segala modifikasinya), pergantian penguasa (*the ruling elite*) biasa dilakukan dengan perebutan kekuasaan yang penuh rahasia dan sering kali keras dan bahkan ganas. Ketertutupan mengundang ketertutupan, kekerasan mengundang kekerasan, pengkhianatan mengundang pengkhianatan. Logika dan etika politik yang berlaku di negara-negara modern demokratis; sistem mekanisme demokrasi dikatakan jalan, hanya kalau masing-masing partai politik (berdasarkan undang-undang dan aturan main) dimungkinkan (berdasarkan pilihan rakyat) untuk secara bergantian menjadi partai pemerintah.

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan sistem multi partai memiliki karakteristik dari sistem banyak partai adalah: (1) terdapat jumlah (struktur) lebih dari dua partai politik, (2) praktik politik "dagang sapi" di kalangan partai-partai politik dalam proses pembentukan kabinet, (3) watak perwakilan (representasi) dalam tubuh kabinet, kabinet koalisi atau kabinet yang terdiri dari blok-blok partai politik yang berkoalisi, (4) kekuatan politik yang terbagi (*shared-partial power*)

²⁹ Diolah dari berbagai sumber.

dalam tubuh kabinet, (5) kabinet labil, sewaktu-waktu terancam perpecahan dari dalam tubuhnya sendiri.

Sedangkan karakteristik dari sistem dua partai adalah: (1) kesederhanaan, (2) kejelasan, (3) kebebasan, (4) kesempatan, (5) kegunaan demi kepentingan publik. Sistem dua partai yang berlaku di Amerika Serikat dan Britania Raya sebetulnya tidak persis sama: Amerika Serikat menganut sistem kabinet presidensial, sedangkan Britania Raya mempraktikkan sistem kabinet parlementer (demokrasi parlementer).³⁰

Dua besar partai politik di Amerika Serikat adalah Partai Demokrat dan Partai Republik, sedangkan di Britania Raya adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh (belakangan berdiri lagi Partai Liberal). Di Amerika Serikat, partai politik yang memenangkan kursi kepresidenan (eksekutif) belum tentu menguasai (mayoritas) dalam Congress (legislatif). Di Britania Raya, pimpinan mayoritas dalam parlemen (legislatif) otomatis merebut kursi perdana menteri. Sedangkan di Indonesia sendiri sejauh ini, masih juga belum nyambung (*unmatched*) antara sistem konstitusional (UUD 1945) yang menganut sistem kabinet presidensial (yang cocok dengan sistem dua besar) dengan warisan kultur praktik kepartaian yang justru ultra multi partai.

³⁰ *Ibid.*

B. PEMUDARAN POLITIK ALIRAN DALAM SISTEM DEMOKRASI MULTI PARTAI

Fenomena memudarnya peran rezim politik aliran dalam sistem politik demokrasi multi partai di Indonesia dapat dijelaskan dengan mengukur sejauh mana terjadinya pemudaran politik aliran, ditambah dengan relevansinya terhadap kemerosotan peran partai politik Islam (Islam Politik), dan pada akhirnya mencoba menelusuri alur penyebabnya:

1. Fenomena Memudarnya Politik Aliran

Pada zaman sekarang ini aliran pemikiran partai politik menurut Herbert Feith telah ada beberapa perubahan, dua atau tiga diantaranya lenyap atau menjadi marginal dalam wacana politik yang penting. Dengan adanya penumpasan PKI pada tahun 1966, maka pemikiran Komunis pada umumnya telah menghilang dari pembicaraan politik publik terutama pada jaman Orde Baru yang merupakan hal tabu untuk di bicarakan pada masa kepemimpinan presiden Soeharto tersebut. Namun, pemikiran tersebut masih terus diungkapkan oleh berbagai penulis asing, itupun hanya membahas mengenai represi yang dialami oleh sisa-sisa PKI di Indonesia.

Tidak hanya Komunisme, Nasionalisme Radikal pun telah surut masa kejayaannya. Hal ini disebabkan karena adanya paksaan dari luar, sejumlah besar aktivis PNI sayap kiri yang telah ditumpas dari kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, masih banyak pemikiran-pemikiran pokok Nasionalisme Radikal yang tetap bertahan dalam masyarakat. Rumusan anti-Imperialisme dan anti-ketergantungan menjadi populer sekali semenjak adanya aliran pemikiran politik Nasionalis Radikal terutama di kalangan mahasiswa anti-pemerintah. Biasanya

aliran pemikiran politik Nasionalisme Radikal dikaitkan dan melekat pada masa kekuasaan presiden Soekarno dalam memimpin Indonesia.

Sedangkan aliran yang menunjukkan kesinambungan, namun perlahan pudar ideologinya hingga sekarang ini adalah aliran pemikiran politik Islam. Ada perbedaan aliran pemikiran politik Islam pada 1945-1965 dengan saat ini, yaitu timbulnya tema-tema baru dari kalangan Nahdatul Ulama (NU). Tema-tema tersebut adalah sifat progresif dan keterbukaan sosial Abdurrahman Wahid serta komentar politik yang tajam dan kocak dari Mahbub Djunaidi. Dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi ketua pengurus besar pada tahun 1984, NU dapat dikatakan telah memperoleh wajah Islam yang modern, hal yang berbeda dengan corak politik Islam NU di era 1945-1965.³¹

Dua aliran terakhir, Tradisionalisme Jawa dan Sosialisme demokratis, tidaklah lenyap sama sekali dalam suatu aliran pemikiran politik, tapi telah terjadi beberapa modifikasi penting. Seperti Sosialisme Demokrat yang menciptakan unsur developmentalis yang erat kaitannya dengan pengertian –pengertian professional dan teknokratis tentang pembangunan ekonomi dan ketidak senangannya terhadap populisme, komunisme dan fanatisme agama. Melalui unsur developmentalis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa aliran pemikiran politik – dan termasuk aliran pemikiran politik Islam -, telah lebih menekankan pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pada aliran pemikiran politik yang terakhir, yaitu Tradisionalisme Jawa telah

³¹ Diolah dari berbagai sumber di .wordpress.com. Lihat juga Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm 197. Lihat pula Clifford Geertz, *The Religion of Java*, London, The Free Press, 1960, Terjemahan Aswab Mahasin, *Abangan, Santri, dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983), hlm 283-286.

bergeser lebih ke unsur integralis, dalam hal apapun orang-orang yang memahami aliran pemikiran politik Tradisional Jawa tetap saja berpegang teguh dengan kejawaannya, suatu hal yang tidak sama persis jika berbicara tentang pemikiran politik Islam.³²

2. Relevansi Memudarnya Politik Aliran Terhadap Kemerosotan Politik Partai Islam

“Era politik aliran sudah tamat”, demikian sebuah judul yang diturunkan sebuah media online nasional dalam menyimpulkan pernyataan Din Syamsuddin (10/4). Pernyataan pimpinan umum Muhammadiyah itu dalam isi beritanya berbunyi “Saat ini sudah sangat-sangat cair, jadi sudah tidak ada politik aliran, apalagi yang bersifat ideologis, keagamaan itu sudah tidak ada, karena sama-sama sudah punya ideologi baru, yaitu pragmatisme politik”. Pernyataan itu dikeluarkan oleh Din ketika menghadiri bedah buku *Dilema PKS; Suara dan Syari'ah* karya Burhanuddin Muhtadi.

Kalau melihat perkembangan tema politik aliran sendiri, maka fokus perbincangannya terletak pada soal penyaluran suara pemilih (konstituen) ke kontestan pemilu (parpol). Sehingga menjadi relevan kalau dikatakan bahwa politik aliran sudah surut atau tamat. Hal ini beranjak dari hasil-hasil pemilu yang didapatkan oleh partai politik peserta pemilu –terlebih pada partai yang disebut sebagai partai Islam.

Politik aliran –dalam pengertian kecenderungan suatu kelompok masyarakat terhadap ideologi atau pandangan tertentu yang diemban partai surut atau tamat? Lebih spesifik lagi apakah kecenderungan umat Islam terhadap parpol-

³² *Ibid*

parpol Islam sudah surut atau tamat? Adabeberapa penjelasan terkait ini. *Pertama*, parpol Islam sejak pasca reformasi tumbuh menjadi kurang lebih 9 partai (PPP, PAN, PKB, PKS (PK), PBB, PBR, PMB, PKNU, PPNUI). Kenyataan parpol Islam yang lebih dari satu ini cukup logis untuk menjelaskan kurang beruntungnya parpol Islam dalam perolehan suara Pemilu. Suara pemilih dari umat Islam terpolarisasi. Sehingga perolehan suara parpol-parpol Islam lebih rendah dari parpol seperti Golkar, PDI dan Demokrat.

Kedua, adalah partai politik Islam sendiri. Hampir tidak ada perbedaan tegas antara parpol Islam dengan parpol sekuler. Dalam beberapa kasus, kader parpol Islam juga tersandung kasus korupsi. Performa inilah yang kemudian membuat konstituen setidaknya meragukan bahkan sampai tidak percaya lagi pada parpol Islam. Belum lagi misalnya pada soal keberpihakan parpol Islam pada isu-isu sensitif yang menyangkut hajat hidup rakyat macam privatisasi, pembatasan subsidi dsb. Di tambah fakta bahwa parpol sekuler pun memiliki sayap partai atau program yang mencoba meraih simpatik umat Islam seperti PDIP dengan Baitul Musliminnya.

Ketiga, fenomena tersebut berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman konstituen –lebih luas lagi masyarakat—terhadap Islam politik. Padahal umat Islam di negeri ini terhitung banyak jumlahnya secara kuantitatif. Pada poin ini terdapat kesenjangan antara jumlah umat Islam dengan perolehan partai Islam –di samping fakta banyaknya parpol Islam. Pemilih dari umat Islam tidak atau masih belum memiliki visi terkait Islam politik. Kalau diteliti lagi, maka pada poin kedua dan ketiga ada kesamaan simpul. Kesamaan itu adalah pragmatisme politik.

Pada parpol, pragmatisme menggeser platform dan ideologi partai. Mahalnya biaya politik dalam sistem demokrasi membuat parpol harus memiliki modal. Dari pintu inilah kader dan petinggi partai tersandung proyek-proyek siluman atau terlibat kebijakan yang merugikan negara dan rakyat. Sementara di kalangan pemilih, terjadi barter suara dengan hadiah tertentu yang diberikan oleh parpol. Rakyat berpikir pragmatis, "yang penting hari ini dapat uang". Ini juga menjadi koreksi terhadap semua parpol, karena parpol malah tidak melakukan pencerdasan politik pada rakyat.³³

3. Alur Penyebab Terjadinya Pemudaran Politik Aliran

a. Suburnya Penyakit Ideologis dan Elitis Partai Politik

Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitabnya *al Takattul al Hizbiy* menyebut ada dua bahaya yang mengancam partai politik : *bahaya ideologis* dan *bahaya kelas* . Dua penyakit itulah yang justru diidap oleh partai politiksaat ini. Tidak mengherankan kalau keberadaan partai-partai sekarang, tidak banyak memberikan kebaikan kepada rakyat. Bahkan justru lebih banyak memberikan keburukan kepada rakyat.

Secara ideologis, nyaris semua partai saat ini mengadopsi ideologi Kapitalisme. Mereka menjadikan nilai-nilai dasar demokrasi diselimuti oleh praktek materialisme dan liberalisme sempit, serta kapitalisme menjadi standar dalam berpolitik yang kemudian menjadi sumber bencana. Partai-partai ini berlomba-lomba menggolkan undang-undang liberal seperti UU Migas, Kelistrikan, Penanaman Modal. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar

³³ Diolah dan diadaptasi dari sumber : [http://politik.kompasiana.com/2012/04/19/PolitikAliran\(IslamPolitik\)Tamatkah?](http://politik.kompasiana.com/2012/04/19/PolitikAliran(IslamPolitik)Tamatkah?)

dalam kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih berpihak kepada pemilik modal, memberikan jalan bagi negara imperialis untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia atas nama pasar bebas dan investasi.

Dengan pradigma kapitalisme ini pula, para elit partai yang ada di parlemen, malahan memuluskan kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Pencabutan subsidi BBM, privatisasi pendidikan dan kesehatan yang semuanya menyengsarakan rakyat. Dengan pradigma kapitalisme ini, partai-partai lebih berpikir untuk saling rebut kekuasaan dibanding mengurus rakyat. Kejahatan bukan untuk diselesaikan. Tapi menjadi alat tawar menawar politik untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan. Sikap kompromi menjadi menonjol, demi keuntungan masing-masing pihak.

Bisa dimengerti kenapa berbagai persoalan yang terkait elit partai seperti skandal BLBI, Bank Century, Lapindo, berlarut-larut penyelesaiannya. Maraknya korupsi yang melanda elit partai menunjukkan bahwa partai lebih sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Politik menjadi alat untuk memperbesar pundi-pundi uang elit partai.

Partai pun lebih sibuk untuk menunjukkan seolah-olah peduli rakyat dengan aktifitas sosial. Memberi bantuan sosial kepada masyarakat, melakukan khitanan massal, atau gerak jalan. Padahal kegiatan itu bukanlah tugas pokok partai. Yang seharusnya dilakukan oleh partai adalah bagaimana membuat kebijakan negara atau pemerintah yang mensejahterakan rakyat. Menggolongkan UU yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, menjamin pendidikan dan kesehatan rakyat. Di sisi lain partai membiarkan negara dengan kebijakannya

memiskinkan rakyat secara sistematis, membiarkan penguasa yang membiarkan jalan-jalan hancur, kelas-kelas sekolah hampir rubuh, kejahatan jalanan yang merejalela. Partai juga diam saat transportasi menjadi alat pembunuh massal akibat kelalaian penguasa.³⁴

b. Fenomena Kebangkrutan Politik Partai

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sekarang ini mengalami kebangkrutan politik. Politik di Indonesia bukan lagi ditujukan untuk semangat memperjuangkan nasib seluruh rakyat Indonesia atau untuk memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, melainkan politik di Indonesia lebih menekankan pada individu dan bagaimana cara mengeruk anggaran negara melalui akses kekuasaan politik dan elite politik di DPR lebih memperjuangkan partai politiknya masing-masing dalam mengegolkan hasrat kekuasaannya.

Fenomena politik di Indonesia kian semakin parah dan rusak, menghalalkan segala cara, tidak mengerti mana yang halal dan haram. Politik di Indonesia sangat busuk dan kotor. Penyakit korupsi yang dilakukan elite politik hampir terjadi di seluruh partai politik yang ada di negeri Indonesia.

Partai politik di Indonesia tidak ada yang bersih dari penyakit korupsi. Semua partai politik di Indonesia saat ini menunjukkan demokrasi yang kebablasan. Lihat saja faktanya, elite politik banyak yang terlibat korupsi dan pencucian uang, yakni para pucuk pemimpin partai politik, dari korupsi Hambalang, suap daging sapi, bahkan Bank Century. Hal ini menunjukkan pada

³⁴ Diolah dan diadaptasi dari Farid Wajdi et.al, *Penyakit Ideologis dan Elitis Partai*, wordpress.com 17 February 2012.

bangsa Indonesia bahwa perpolitikan di Indonesia mengalami kebangkrutan dalam menalar secara politik.

Kenichi Ohmae dalam karyanya "The End of The Nation State" (1996), menyatakan lebih ekstrem, banyak kekerasan politik dalam pilkada, merebaknya korupsi yang dilakukan elite politik, menjadi salah satu indikasi berakhirnya negara bangsa (nation state), bangsa Indonesia akan mengalami kehancuran. Moral elite politik mulai hilang diterpa nalar materialisme, pragmatisme, dan populisme. Unsur menjaga martabat dan wibawa sebagai pemimpin bangsa mulai sirna, rasa kejujuran, dan kemanusiaan mulai tak tampak dalam kinerja di pemerintahan. Elite politik mulai tidak mengerti arti sesungguhnya apa itu makna berpolitik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Politik kekuasaan yang terjadi di Indonesia ini adalah politik yang anarkis, politik kesemrawutan, politik distrust, politik individualisme kepartaian, politik kekuasaan, dijadikan sebagai politisasi untuk mengusung kepentingan masing-masing dari sebuah partai politik dalam memperoleh keuntungan material dan harta dari anggaran negara.

Padahal, politik sudah semestinya mengedepankan pada politik kesejahteraan sebagai kulturalisasi demi memperjuangkan nilai/value sejahteranya hidup bersama dalam homo homini socius, yakni manusia adalah saudara bagi sesama. Oleh karena itu, elite politik saat ini sudah seharusnya mengedepankan nilai-nilai nasionalisme. Nasionalisme merupakan bentuk mencintai rasa tanah air

ke-Indonesian dan kebangsaan, rasa kemanusiaan dan rasa kesejaheteraan bagi rakyat Indonesia.

Elite politik saat ini lebih menekankan pada ego kepartaian, fanatisme partai politik, bukan berdirinya partai politik atas nama kepentingan nasional dan untuk kebangkitan politik nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, elite partai politik harus mulai mengubah paradigma cara berpolitik, dari egosentrisme kepartaian menuju partai politik yang selalu menjunjung tinggi semangat nasionalisme, persatuan untuk kepentingan bangsa Indonesia.³⁵

c. Kerapuhan Lembaga Partai Politik dan Praktek Politik Berbiaya Tinggi

Penyakit dalam partai politik disebabkan terutama oleh factor internal dan factor eksternal partai politik. Factor internal partai politik dipengaruhi oleh kelembagaan partai politik. Kelembagaan yang dimaksud ialah proses pembentukan organisasi partai dari segi system. Dalam hal ini adalah kaderisasi partai politik. Ppartai politik cenderung menciptakan kader-kader instan. Artinya orang-orang yang menduduki elite partai bukan orang-orang yang mengikuti jenjang kaderisasi partai. yang lebih berbahaya ialah uang menjadi sebuah alasan bagi parpol untuk merekrut seorang kader. Pada akhirnya ialah partai politik hanya berisikan orang-orang yang mempunyai uang banyak.

Maka tidaklah heran jika dalam memainkan fungsinya partai tidak lagi pro rakyat miskin. Jika hal ini semakin terjadi maka rakyat akan semakin muak dan memboikot partai politik dalam pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dari tren golput yang dari pemilu ke pemilu semakin tinggi. Maka pembenahan kelembagaan

³⁵ Diolah dan diadaptasi dari Syahrul Kirom et.al, *Kebangkruatan Politik*, <http://www.shnews.com>. 25 September 2013.

partai menjadi sebuah solusi. Rekrutmen politik partai haruslah jelas (tidak berstandar ganda) sehingga kader-kader yang ada dalam partai tersebut mencerminkan ideology partai.

Factor eksternal dapat dilihat dari high cost politic. Dalam pemilihan umum partai politik tentulah memerlukan pembiayaan partai. lumrahnya pembiayaan partai didapat dari internal partai melalui sumbangan anggota partai politik. Namun, dalam realitanya sumbangan dari anggota partai politik sangat kurang untuk menutupi pembiayaan politik di pemilu. Dalam pemilu kada misalnya, untuk memenangkan suatu calon partai membutuhkan berpuluh-puluh milyar. Jumlah tersebut tidak bisa ditutupi jika partai mengajukan calon internal tapi tidak memiliki uang.

Maka dari itu partai mencoba melakukan konvensi bagi calon-calon lain yang memiliki uang. Dan yang lebih sering dilakukan partai politik ialah menungu mahar dari calon lain (berasal dari partai lain) untuk memberikan dukungan. Sama hal nya di level legislative. Untuk mengusung caleg internal partai memberlakukan money politics. Anggota partai yang memberikan uang lebih banyak tentu akan di berikan nomer urut terbaik dan ditempatkan di daerah yang menguntungkan caleg partai tersebut. Belum lagi ketika pemilu legislative beralangsur, berapa uang yang dikeluarkan caleg untuk merebut kursi legislative? Tentu lebih dari 1 milyar. Jika hal tersebut terus terjadi maka mau tidak mau pragmatism dalam pembiayaan politik harus terjadi. Korupsi menjadi langkah “terbaik” dan mudah untuk dilakukan partai melalui anggota-anggotanya yang berada di jabatan public.

Penyakit partai politik tidak bisa dihilangkan dengan hanya memasang iklan untuk anti korupsi, mengajak masyarakat untuk tidak korupsi. Sesungguhnya yang perlu diajak untuk anti korupsi ialah partai partai yang beriklan tersebut. Pemberantasan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembenahan di internal dan eksternal partai, yaitu pelebagaan partai melalui kaderisasi dan system partai. Yang kedua ialah menekan high cost politics.

Saat ini sudah banyak study yang memberikan secara rinci untuk menekan biaya kampanye partai. study tersebut menekankan bahwa kampanye politik yang low budget dapat terjadi jika partai-partai mengusung calon legislative, eksekutif di pusat maupun daerah yang merupakan kader-kader terbaik partai. sehingga bisa dilihat korelasi antara factor eksternal dan factor internal partai. Dengan demikian partai politik tidak lagi menyalahkan masyarakat yang membuat high cost politic. Karena dengan kelembagaan partai yang bagus, high cost politic tidak akan terjadi. Ketika harga politik yang rendah maka akan timbul kader-kader terbaik bangsa yang berasal dari partai politik. Dengan demikian penyakit partai perlahan akan terbasmi dengan sendirinya.³⁶

d. Perilaku Pemilih Rasional

1. Konsep Dasar Pemilih Rasional

Perilaku pemilih rasional lebih dominan berorientasi pada masalah publik daripada faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam pogram kerjanya. Pogram kerjapartai biasanya di analisis dalam dua hal yaitu kinerja partai di masa lalu dan tawaran

³⁶ Diolah dan diadaptasi dari Ghazi Zul Azmi et.al, *Penyakit Partai Politik Penyakit Bangsa Indonesia*, wordpress.com. 20 Mei 2013.

pogram untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kedua hal tersebut sama-sama mempengaruhi pemilih karena mereka tidak hanya melihat pogram kerja partai yang berorientasi masa depan, tetapi juga menganalisis apa saja yang telah dilakukan oleh partai tersebut di masa lampau.

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik. Begitu juga seperti paham, asal usul, nilai tradisional, budaya, agama dan psikologi juga diperhitungkan tetapi tidak bersifat signifikan. Hal terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh sebuah partai politik atau kandidat, dari pada paham dan nilai dari sebuah partai atau kandidat. Oleh karena itu, ketika sebuah partai politik ingin menarik perhatian pemilih, mereka harus mengedepankan solusi logis akan permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial-budaya, hubungan luar negeri, pemerataan pendapatan, dan disintegrasi nasional. Kemudian pemilih rasional bisa berpindah ke lain hati dengan beralih dari sebuah partai politik ke partai politik lain ketika mereka di anggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan nasional.³⁷

2. Pemilih Rasional di Indonesia

Pemilih rasional adalah orang yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Pemilih rasional akan memilih partai politik, anggota legislatif, dan pasangan presiden dan wakil presiden, yang menurut perhitungan pribadinya akan membawa keuntungan baginya di masa depan, apa pun bentuk keuntungan itu. Menyebut bahwa pemilih sudah rasional

³⁷ Diolah dan diadaptasi dari A Rofik et.al, *Marketing Politik dan Pemilih Rasional*, blogger.com, 17 Mei 2012.

paling tidak mengandung dua asumsi mendasar. Pertama, objek pilihan mempunyai diferensiasi. Kedua, pemilih itu terdidik. Terdidik di sini berarti tahu atau mempunyai kemampuan untuk mengakses informasi mengenai pilihannya.

Kedua asumsi ini tidaklah terlalu tepat dalam menggambarkan kehidupan politik Indonesia, jika ranah yang dimaksud adalah ranah pemilihan terhadap individu sebagai aktor politik. Mengingat para pemilih belum memiliki akses yang luas untuk mengenal setiap individu calon yang akan dipilih. Namun berbeda halnya jika ranah yang dimaksud adalah ranah pemilihan partai politik, secara umum semua partai politik di Indonesia telah cukup familiar dengan mayoritas pemilih, sehingga pemilih bisa menentukan pilihannya secara rasional.

Pemilih di Indonesia dihadapkan pada persoalan belum mempunyai pilihan yang bervariasi untuk menentukan mana yang akan memberikan keuntungan optimal. Dengan kata lain, ada 2 hal kemungkinan dalam situasi ini yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Pemilih tidak menentukan pilihannya berdasarkan rasionalitas karena mereka memilih bukan berdasarkan perbedaan parpol- parpol yang memang tidak ada. *Kedua*, Pemilih memilih dengan modal pengetahuan yang sangat terbatas mengenai pilihan yang ada.

Pemilih rasional akan memilih caleg yang bukan hanya mereka kenal, tapi juga berkualitas, karena caleg yang berkualitas dan bukan caleg yang populer yang akan memberikan keuntungan buat pemilih. Tanpa kapabilitas dan kapasitas yang tinggi, hampir tidak mungkin caleg mampu membawa keuntungan buat pemilihnya. Sementara itu, pemilih yang kekurangan akses informasi mengenai kualitas caleg yang diajukan akan cenderung memilih caleg yang mereka kenal.

Situasi di mana pemilih masih belum rasional dalam hal pemilihan caleg dan mempunyai akses informasi dan pengetahuan politik yang sangat terbatas membuka kesempatan dan mendorong para partai politik untuk mencari jalan pintas dan mudah untuk menang dalam pemilu. Banyak caleg yang diajukan parpol bukan karena kualitas, tetapi karena popularitas. Dengan keadaan yang demikian maka pemilih yang belum rasional atau kekurangan informasi mengenai kapasitas dan kapabilitas politik caleg, mau tidak mau akan memilih caleg yang mereka kenal dan populer.

Banyaknya caleg yang diajukan parpol karena kepopuleran menjadi indikasi pemilih belum rasional. Pilihan pemilih bisa dikatakan rasional jika dia memiliki informasi yang cukup untuk menentukan pilihan. Pilihannya bisa dikatakan rasional jika pilihan yang tersedia bervariasi. Tanpa variasi dari pilihan yang tersedia, sulit untuk mengatakan bahwa keputusan atau pilihan pemilih bersifat rasional. Pemilih yang rasional akan menolak elite yang hanya mengandalkan popularitas dan yang tidak mampu menampung dan menjawab aspirasi mereka.³⁸

3. Membangun Pemikiran Rasional Sebagai Pemilih

Pemikiran rasional akan bisa dibangun dengan pendidikan politik bagi pemilih. Pemilih harus dididik untuk mengetahui, bagaimana cara mengakses informasi politik dan mengolahnya, sehingga mereka bisa menilai secara baik kualitas pilihan yang tersedia dalam pemilu nanti. Akan tetapi hal yang lebih penting dalam pendidikan pemilih adalah bagaimana ia menentukan pilihan secara

³⁸ *Ibid.*

tepat. Realitanya proyek pendidikan pemilih seringkali diarahkan kepada kepentingan golongan tertentu, yang itu sama sekali bukan pencerdasan, melainkan penghasutan dan pembodohan.

Pendidikan pemilih menjadi ajang mendidik para pemilih bagaimana memilih satu partai tertentu, partai mana yang harus dicoblos dan bagaimana cara memilih nomor tertentu, jangan sampai melenceng ke nomor yang lain. Para pemilih bukan semakin rasional dan objektif memilih, melainkan semakin tradisional dan buta terhadap kemungkinan pilihan yang lain.

Hal ini tidak arif dimana menimpakan kesalahan kepada partai-partai politik yang melakukan pendidikan pemilih untuk kepentingan partainya. Sebab partai politik memang selalu memiliki kepentingan dengan semua warga negara yang punya hak pilih, yaitu bagaimana partainya memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Pendidikan pemilih yang berorientasi kepentingan suara memang salah satu bentuk kampanye dari partai-partai politik peserta Pemilu. Permasalahannya adalah ketika pendidikan pemilih untuk menciptakan pemilih rasional tidak memadai maka akan berdampak langsung kepada hasil Pemilu.

Pemilu sebenarnya adalah momentum perubahan dan ajang evaluasi. Pada momentum Pemilu rakyat bisa melakukan kritik bahkan hukuman kepada kekuatan-kekuatan politik yang bermasalah, yakni dengan cara tidak menyalurkan suara kepadanya. Momentum ini juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pemilih untuk menentukan ke arah mana bangsa ini mau dibawa. Hasil pilihan merupakan bukti kongkrit keinginan masyarakat pemilih. Hasil itu juga akan melegitimasi sebuah kekuasaan. Pemilu merupakan bentuk

kekuasaan rakyat atas sebuah negara. kekuasaan itu diwakilkan kepada elit-elit politik yang dipilih dalam Pemilu.

Para elit terpilih itu kemudian bisa mengklaim tindakannya sebagai tindakan yang diinginkan oleh rakyat, karena rakyat telah memilihnya. Oleh karena itu, pemilih yang rasional sangat menentukan masa depan negara. Di tangan para pemilih rasional sebuah hukuman bisa dijatuhkan kepada para penguasa yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Sementara para pemilih yang tidak rasional atau pemilih tradisional tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya melegitimasi kekuasaan terpilih, yang kemungkinan besar pilihan itu tidak tepat. Para pemilih tradisional akan dengan mudah diombang-ambing oleh segala bujuk rayu politisi. Mereka akan dengan mudah termakan oleh janji agenda- agenda pendek yang semu. Misalnya, kecenderungan para pemilih sekarang untuk tetap mempertahankan pilihannya pada Pemilu yang lalu.

Padahal para penguasa terpilih yang lalu itu tidak menunjukkan kinerja yang berarti untuk mengatasi berbagai krisis yang melanda, bahkan para politisi tersebut tidak memiliki niat baik untuk melakukan perubahan. Tapi kemudian dipilih lagi. Dan berbagai hasil survey menunjukkan hasil Pemilu sekarang tidak akan banyak perubahan. Ini menjadi satu bukti betapa evaluasi dari masyarakat Pemilih itu sangat minim. Kalaupun ada evaluasi, evaluasi itu tidak berangkat dari sebuah pertimbangan rasional.

Kemudian munculnya banyak nama yang bermasalah menunjukkan bahwa para politisi kita belum terlalu takut kepada hukuman masyarakat pemilih. Bahkan

para politisi itu cenderung memanfaatkan ketidakrasionalan para pemilih. Dan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi. Demokrasi muncul dari sebuah rasionalitas kekuasaan.

Pada titik ini, mendidik para pemilih untuk bersikap rasional adalah sesuatu yang mutlak bagi kelangsungan demokratisasi yang sedang merangkak di antara bayang-bayang kekuasaan otoriter masa lalu. Agenda-agenda reformasi terutama dikandaskan oleh ketiadaan evaluasi rasional dari para pemberi legitimasi kekuasaan, yaitu para pemilih. Logika para penguasa tentu saja adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan. Kalau para penguasa itu akan tetap bertahan dengan membohahi rakyat, maka itu akan dilakukan oleh mereka. Rakyat harus bisa mandiri dalam menentukan sikap.³⁹

C. EKSISTENSI POLITIK ALIRAN DAN MASA DEPAN POLITIK ISLAM DALAM PRAKTEK SISTEM DEMOKRASI MULTI PARTAI

Eksistensi dan fenomena memudarnya peran rezim politik aliran di Indonesia menyebabkan paling sedikit terjadinya dua persoalan yang akan mencuat yaitu: *Pertama*, masa depan politik Islam berpeluang memiliki tata hubungan atau konfigurasi baru dalam praktek sistem demokrasi multi partai saat ini. *Kedua*, persoalan eksistensi politik aliran ini, sedikit banyak ikut mewarnai proses panjang konsolidasi demokrasi yang terjadi di Indonesia sekarang:

³⁹ *Ibid.*

1. Masa Depan Politik Islam

a. Politik Islam Pasca Reformasi

Pasca reformasi 1998 kontestasi antara kelompok Islam politik (Islamistis) dan politik Islam (Islam substantif) terus terjadi dan berjalan secara dinamis. Islamistis adalah sebuah kelompok dalam Islam yang menginginkan penerapan syariat Islam secara formal, meyakini Islam sebagai sebuah keyakinan hidup (*belief system*) yang sempurna, dan mencita-citakan berdirinya sebuah sistem Islam atau *Islamic state*. Mereka ini terus berusaha menyebarkan pengaruhnya di Indonesia.

Kelompok ini dalam banyak hal diwakili oleh Islam transnasional. Kelompok ini banyak beraktivitas dalam organisasi seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan kelompok tarbiyah yang banyak berinduk dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai politik Islam seperti Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dikelompokkan dalam kelompok ini. Hingga hari ini, dengan caranya masing-masing, mereka terus menyuarakan aspirasi politik Islam secara formal, baik di tingkat negara maupun peraturan-peraturan daerah.

Berbeda dengan aspirasi umat Islam mainstream di negara ini, kelompok yang disebut sebagai Islam Syariat ini banyak mengagendakan terwujudnya sistem Islam di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Haedar Nashir dalam *Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (MAARIF Institute & Mizan, 2013), mengkaji secara mendalam tentang genealogi, konsep, metode, dan cita-cita politik kelompok Islam ini.

Di sisi lain, kelompok politik Islam substantif cenderung menyerukan pemahaman dan aspirasi politik Islam yang lebih moderat. Kelompok ini direpresentasikan oleh organisasi Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU. Kelompok ini juga diwakili oleh partai-partai yang berbasiskan organisasi Islam, tapi berdasarkan visi kebangsaan. Hingga hari ini organisasi muslim terbesar di Indonesia yang diwakili oleh Muhammadiyah dan NU tidak menyetujui penerapan syariat Islam secara formal di level negara.

Mereka juga menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang wajib dijaga oleh seluruh komponen bangsa. Islam substantif ini juga diwakili oleh sebagian aktivis Islam yang aktif di berbagai organisasi sekuler dan partai nasionalis. Tampaknya memang telah terjadi pergeseran di kalangan muslim Indonesia terkait aspirasi politiknya. Mereka berpikir bahwa aspirasi politik Islam bisa disalurkan lewat partai lain yang bervisi inklusif dan kebangsaan (Anies Baswedan, *Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory*, 2004). Jadi aspirasi politik Islam tidak identik dengan partai Islam.

Fenomena sebetulnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah dimulai di Partai Golkar sejak era 1980-an ketika partai ini banyak merekrut para aktivis Islam sebagai pengurus dan kadernya. Pascareformasi fenomena ini semakin berkembang karena banyak pimpinan inti partai-partai nasionalis yang berasal dari kaum santri. PDI Perjuangan dan Demokrat bahkan membentuk sayap organisasi Islam.⁴⁰

⁴⁰ Ahmad Fuad Fanani et.al, *Pluralitas Aspirasi Politik Umat Islam*, Koran SINDO, Kamis, 24 Oktober 2013, dalam wordpress.com.

Khusus partai Islam, berbagai survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network, Lembaga Survei Indonesia, dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa suara partai Islam diperkirakan akan semakin merosot ke bawah, ada beberapa partai Islam yang kemungkinan besar tidak lolos *electoral threshold*. Itu disebabkan antara lain oleh performa partai Islam yang makin memudar akibat konflik internal, fenomena korupsi para pimpinannya, dan kekaburan visi dari partai Islam bila dibandingkan partai nasional lain.

Tidak heran jika suara partai Islam terus menurun dan tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan. Pada level calon pemimpin nasional pun, dalam banyak survei terakhir, tidak muncul nama pimpinan partai Islam yang popularitas dan elektabilitasnya tampil secara meyakinkan. Namun, diskusi tentang ekspresi politik umat Islam tentu tidak bisa hanya dibatasi pada soal partai Islam. Banyak aspek dalam politik Islam yang menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi.

Riset yang dilakukan Sunny Tanuwidjaja menunjukkan bahwa fenomena Indonesia pascareformasi tampak jelas menunjukkan bahwa Islam telah dan terus memainkan posisi penting dalam politik Indonesia meskipun suara partai Islam terus turun secara signifikan (*Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically Assessing the Evidence of Islam's Political Decline*, 2010). Itu misalnya tampak pada fenomena dukungan partai-partai nasionalis terhadap agenda perda-perda syariat di berbagai daerah.

Juga pada dukungan partai-partai di parlemen terhadap undang-undang yang menjadi aspirasi umat Islam seperti RUU Sisdiknas Tahun 2003, RUU Pornografi dan Pornoaksi, RUU Zakat, dan sebagainya. Pada titik tertentu kebijakan politik luar negeri Indonesia yang mengampanyekan tentang Islam moderat juga bentuk lain dari aspirasi politik Islam pasca reformasi.

Jika sebelumnya suara Islam nyaris absen dalam politik luar negeri Indonesia, tampaknya pergeseran geopolitik internasional dan aspirasi umat Islam di tingkat nasional turut memengaruhi politik luar negeri itu. Faktor para tokoh Islam yang berhasil mengajak para anggotanya untuk berpartisipasi mengawal transisi demokrasi di Indonesia hingga terkonsolidasi merupakan contoh lain dari ekspresi politik Islam.⁴¹

b. Masa Depan Politik Islam

Masa depan politik di Indonesia sesungguhnya akan sangat ditentukan oleh cara berpikir dan bertindak (perilaku) umat Islam mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam. Dalam konteks sistem politik perwakilan, maka representasi politik umat Islam di lembaga politik kenegaraan menunjukkan angka keterwakilan yang cukup normal. Politik Islam di Indonesia saat ini tidak bisa hanya melihat partai politik (parpol) yang menggunakan Islam sebagai asas atau dasar formalnya. Tetapi, juga parpol yang menggunakan asas selain Islam di dalamnya dan terdapat para aktivis muslim yang memiliki komitmen kuat kepada Islam.

⁴¹ *Ibid.*

Jika membaca sejarah bahwa di masa rezim Orde Baru berkuasa, telah terjadi represi politik yang kemudian menyebabkan para aktivis muslim mengubah jalan perjuangan. Karena, represi politik rezim penguasa yang sedemikian kuat membuat perjuangan struktural melalui jalur politik dirasakannya semakin berat. Sebab itu, sebagian mereka kemudian mengambil jalan non politik.

Perubahan sikap sebagian aktivis muslim inilah yang kemudian melahirkan dua istilah kategoris bernuansa akademik, "Islam politik" dan "Islam kultural". Istilah Islam politik dilekatkan kepada para aktivis politik muslim yang bercitra sama dengan para aktivis politik muslim era lima puluhan di Dewan Konstituante. Sedangkan Islam kultural dilekatkan kepada mereka yang lebih memilih Islam tidak dijadikan sebagai baju atau bendera dalam berpolitik.

Kelompok Islam kultural mendapatkan ruang berkembang yang sangat baik. Sebab, kelompok ini tidak menimbulkan kecurigaan dan ketegangan dengan rezim karena tidak menempatkan gagasan konstruksi negara yang berlawanan dengan gagasan negara-nasional yang dipegang teguh oleh rezim. Setelah berkembang pesat dan mendapatkan kesempatan yang baik, mereka mengambil jalan struktural masuk ke struktur birokrasi negara. Jalan ini semakin mendapat legitimasi intelektual setelah Nurcholish Madjid (Alm) melontarkan jargon politik, "Islam Yes, Partai Islam No?".

Jargon politik Cak Nur ini telah membuat banyak aktivis Islam masuk ke Golkar dan di antara mereka juga ada yang masuk PDIP. Partai non Islam bukan lagi "barang haram" bagi para aktivis muslim, bahkan kemudian dijadikan juga sebagai lahan untuk mengalokasikan nilai-nilai Islam dalam praktik politik.

Dari sinilah mulai terjadi "penghijauan" politik dan birokrasi. Umat Islam menjadi semakin dekat dengan kekuasaan. Bahkan, karena perubahan konstelasi politik, rezim menjadi merasa perlu untuk menjalin hubungan yang erat dengan umat Islam. Konteksnya adalah untuk mempertahankan dukungan politik.

Setelah era keterbukaan dimulai dan melahirkan banyak parpol. Umat Islam bebas mendirikan dan berafiliasi dengan parpol mana pun. Para aktivis muslim tersebar di berbagai parpol yang ada, baik menggunakan Islam maupun selain Islam sebagai dasar formal. Mereka yang berpandangan bahwa Islam dan politik harus disatukan, mendirikan atau berafiliasi dengan parpol berbasis Islam. Sedangkan mereka yang berpandangan bahwa Islam dan politik seharusnya dipisahkan, atau Islam harus dijadikan sebagai landasan etika dalam politik, mendirikan atau berafiliasi dengan parpol yang menggunakan dasar formal selain Islam.

Pada masa inilah para aktivis muslim yang memasuki dunia politik memiliki kesempatan untuk mengekspresikan perspektif keislaman. Sejarah akan mencatat, apakah mereka akan tetap konsisten dengan perspektif dan paradigma yang dimiliki, ataukah sebaliknya tidak konsisten dengan perspektif dan paradigma mereka sendiri.

Konsistensi dan inkonsistensi mereka akan dilihat dan dicatat oleh rakyat. Jika konsisten, rakyat akan memberikan dukungan. Sebaliknya, jika inkonsisten, tentu saja rakyat akan memberikan hukuman melalui mekanisme demokrasi yang saat ini sudah semakin maju dan membuat rakyat semakin berdaulat, serta dapat secara relatif langsung dalam menentukan wakil dan pemimpin politik.

Saat ini masyarakat tidak lagi melihat parpol dari dasar formal yang digunakan saja. Sebab, banyak parpol memiliki dasar formal sama, menggunakan Islam sebagai asas/dasar, atau nasionalisme, dan seterusnya. Namun, dasar formal ternyata tidak berkorelasi dengan praktik politik keseharian para politikusnya. Partai Islam tidak menjamin perilaku politik para politikusnya sesuai dengan Islam. Demikian juga dengan parpol yang menggunakan nasionalisme sebagai asas. Karena itu, jika toh dasar formal digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan dukungan, sesungguhnya yang lebih penting adalah konsistensi gagasan yang ditransformasikan secara sungguh-sungguh dalam bentuk kinerja. Singkatnya, yang dinilai oleh rakyat bukan hanya formalitas ideologi atau pandangan politik, tetapi kinerja dalam memperbaiki kehidupan rakyat.

Karena itu, masa depan politik Islam di Indonesia sesungguhnya sangat ditentukan oleh perilaku para politikus muslim dan kemampuannya memahami korelasi Islam dengan politik, diikuti dengan upaya mentransformasikannya dalam bentuk kebijakan dan kinerja riil.⁴²

2. Peluang Konsolidasi Demokrasi

Sebuah sistem demokrasi dikatakan terkonsolidasi apabila ia “mendapatkan legitimasi yang luas dan kuat dari warga negara sehingga sangat kecil kemungkinannya ia akan ambruk.” (Diamond, 1996: 238). Dengan kata lain, “Demokrasi terkonsolidasi ketika ia menjadi satu-satunya aturan main, dan ketika tak seorang pun dapat membayangkan untuk bertindak di luar sistem demokrasi;

⁴² Muhammad Abu Nadli et.al, *Masa Depan Politik Islam*, Suara Karya, 11 Mei 2012, dalam wordpress.com.

ketika kelompok yang mengalami kekalahan menggunakan aturan yang sama (demokrasi) untuk membalas kekealahannya” (Przeworski 1991: 26).

Sejumlah hipotesis tentang konsolidasi demokrasi; Demokrasi terkonsolidasi bila:

- Mendapatkan legitimasi yang luas dan kuat dari warga sehingga sangat kecil kemungkinannya ia akan amruk (Diamond 1996)
- Menjadi satu-satunya aturan main, dan ketika tak seorang pun dapat membayangkan untuk bertindak di luar sistem demokrasi;
- Ketika kelompok yang mengalami kekalahan menggunakan aturan yang sama [demokrasi] untuk membalas kekealahannya.
- Pada tingkat perilaku, tidak ada kekuatan signifikan di dalam sebuah negara yang menentang demokrasi.
- Pada tingkat sikap, demokrasi diterima secara luas di masyarakat sebagai sistem politik terbaik.
- Secara konstitusional, semua kekuatan menjadi hamba hukum, atau setiap konflik diselesaikan lewat proses hukum.

Adapun parameter konsolidasi demokrasi menurut Linz and Stepan 1996:

- Pada tingkat perilaku, tidak ada kekuatan signifikan di dalam sebuah negara yang menentang demokrasi.
- Tidak signifikannya kekuatan yang mentoleransi kepemimpinan politik tentara.
- Pada tingkat sikap, demokrasi diterima secara luas di masyarakat sebagai sistem politik terbaik.

- Secara konstitusional, semua kekuatan menjadi hamba hukum, atau setiap konflik diselesaikan lewat proses hukum.

Adanya legitimasi yang kuat dari warga, atau adanya penerimaan sebagai satu-satunya aturan main dalam membangun dan melaksanakan pemerintahan tersebut ditandai oleh tidak signifikannya perilaku menentang demokrasi dari kekuatan-kekuatan yang ada, tumbuhnya keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik, dan berfungsinya negara secara efektif dalam penegakan hukum.

Konsolidasi demokrasi sebagaimana terlihat dari sikap dukungan yang luas dari masyarakat terhadap demokrasi banyak ditentukan oleh kinerja demokrasi itu sendiri, misalnya apakah masyarakat merasakan puas dengan pelaksanaan demokrasi atau tidak. (Fuchs, Guidorossi, dan Svensson, 1995; cf. Norris, 1999). Kepuasan ini terkait dengan kinerja pemerintahan demokrasi itu sendiri, yakni bagaimana masyarakat menilai kinerja pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Masalah yang dihadapi masyarakat terutama terkait dengan kinerja ekonomi secara nasional. Secara umum kinerja ekonomi nasional yang baik membuat demokrasi stabil dan terkonsolidasi (Prezeworski et al, 2000; Wheaterford, 1990; Dutt dan Kornberg 1994).

Pada kasus demokrasi di Indonesia, dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem politik terbaik bagi bangsa Indonesia sudah cukup baik, tapi tidak cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia telah terkonsolidasi. Di negara-negara demokrasi, pandangan positif warga terhadap demokrasi biasanya

lebih dari 84%. Sedangkan Indonesia dalam satu windu ini baru mencapai rata-rata sekitar 72%.

Di samping itu masih cukup besar di antara anggota masyarakat yang toleran terhadap keterlibatan tentara aktif dalam politik praktis, misalnya menjadi pemimpin nasional. Di negara-negara demokrasi yang terkonsolidasi tingkat toleransi terhadap kepemimpinan militer dalam politik ini tidak lebih dari 10%. Di Indonesia dalam satu windu terakhir ini toleransi terhadap kepemimpinan tentara aktif masih sekitar 30%.⁴³

Masih belum optimalnya sentimen positif terhadap demokrasi terkait dengan penilaian masyarakat bahwa demokrasi Indonesia belum berjalan sebagaimana diharapkan. Masih besar di antara warga yang merasa tidak puas dengan kinerja demokrasi. Keadaan ini terkait kuat dengan kinerja pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini, terutama dalam masalah ekonomi. Penilaian negatif atas kinerja pemerintah berdampak pada penilaian negatif atas kinerja demokrasi, dan pada akhirnya tidak memberikan dukungan terhadap ide bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik, dan cenderung toleran terhadap kepemimpinan tentara aktif dalam politik nasional. Karena itu konsolidasi demokrasi akan banyak tergantung pada kinerja pemerintah demokrasi sekarang. Lambannya pemulihan ekonomi bisa menjadi sumber negatif sangat serius bagi nasib demokrasi Indonesia ke depan.

⁴³ Semua data diolah dan kemudian diselaraskan dari berbagai sumber dalam wordpress.com.

Bab III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari kajian terhadap persoalan eksistensi politik aliran dalam sistem demokrasi multi partai sebagaimana telah menjadi fokus dari penelitian ini, banyak hal menarik yang dapat ditarik sebagai kesimpulan berikut ini:

Pertama, setelah bergulirnya era reformasi, sistem politik di Indonesia mendadak berubah dari format sebelumnya yang menganut sistem demokrasi terbatas dengan dua partai politik plus satu golongan dominan (Golkar), berubah total menjadi sistem demokrasi multi partai. Dimana pada awal reformasi ditandai dengan fenomena lahirnya partai politik dalam jumlah yang sangat banyak. Kemunculan partai yang beragam turut pula membawa pengaruh ideologi yang berbeda-beda. Meskipun dari pemilu ke pemilu yang terjadi di era reformasi, jumlah partai terlihat perlahan-lahan mulai berkurang. Hal ini disebabkan oleh seleksi dan sistem verifikasi peserta pemilu oleh KPU yang semakin ketat.

Meskipun demikian perkembangan sistem demokrasi multi partai sampai saat ini terus mengalami perkembangan pesat dengan berbagai variasi dan dinamika yang meyerainya. Inilah alasan kuat untuk menyimpulkan bahwa setelah reformasi sistem demokrasi multi partai berkembang begitu cepat dan menghadirkan konfigurasi baru dalam perjalanan politik negeri ini.

Kedua, berkembangnya sistem demokrasi multi partai setelah reformasi telah secara massif melahirkan seribu macam persoalan baru, termasuk salah satunya adalah fenomena menyeruaknya politik aliran, yaitu pakem politik yang

berjalan di atas garis patronase ideologi tertentu seperti ideologi Islam, ideologi Kristen, ideologi nasionalis, ideologi developmentalis, dan lainnya. Fenomena ini sekaligus menciptakan jurang fragmentasi politik yang cukup kuat di antara penganut ideologi yang berbeda.

Pada awal reformasi, partai Islam (politik Islam) begitu larut dalam buaian politik aliran ini, sehingga sempat memunculkan isu penegakan syariat Islam. Namun ternyata fenomena politik aliran hanya tampak kuat pada pemilu 1999 dan menjelang 2004 saja. Tetapi pada pemilu 2009 lalu, politik aliran telah benar-benar redup yang ditengarai disebabkan oleh beberapa faktor mendasar yaitu: semakin suburnya penyakit ideologis dan elitis partai politik tidak terkecuali partai Islam, menguatnya fenomena kegagalan politik partai dalam menjalankan peran dan fungsi yang sesungguhnya, rapuhnya lembaga partai politik dan semakin tingginya biaya penyelenggaraan politik, dan semakin berekembangnya semangat dan perilaku pemilih rasional di Indonesia.

Inilah segenap alasan mengapa masyarakat merasa gerah terhadap ulah partai politik. Di kalangan masyarakat muslim sendiri tidak lagi menaruh perbedaan antara partai Islam dan partai non Islam, atau bahkan terjadi fenomena apatisisme politik yang makin meluas di kalangan masyarakat. Pada akhirnya kesemua fakta tersebut secara dominan menyebabkan terjadi pemudaran politik aliran di Indonesia dewasa ini.

Ketiga, meskipun politik aliran (partai Islam) terindikasi mengalami pemudaran secara perlahan dari pemilu ke pemilu, namun dapat pula disimpulkan bahwa politik Islam Indonesia kian hari kian menunjukkan

eksistensi peran yang semakin kuat dalam kancah politik nasional. Hal ini disebabkan bahwa wajah politik Islam Indonesia telah bermetamorfosis ke dalam bentuk yang lebih luas. Politik Islam Indonesia tidak lagi menjadikan partai Islam sebagai representasi utama, namun politik Islam saat ini direpresentasikan secara meluas oleh organisasi Islam, LSM Islam, para aktifis Islam, partai Islam, dan semangat Islam ke-Indonesiaan itu sendiri.

B. REFLEKSI

Perlu membedakan antara persoalan eksistensi politik aliran yang secara kaku berdiri di atas patronase ideologi Islam dan partai politik Islam, dengan persoalan eksistensi politik umat Islam yang rasional dan dinamis berdasarkan pada pemenuhan hak-hak dan kewajiban selaku warga negara. Persamaannya adalah bahwa kedua persoalan tersebut dapat tumbuh dan berkembang dalam sistem demokrasi multi partai seperti sekarang ini, namun keduanya memiliki implikasi berbeda. Persoalan pertama (eksistensi politik aliran) memiliki adaptasi yang alamiah terhadap kehidupan demokrasi, khususnya sistem demokrasi multi partai, karena politik aliran dibangun di atas dasar norma ideologi yang kuat, sebagai sebuah keharusan mendasar bagi setiap partai politik.

Namun dalam kasus Indonesia, penguatan politik aliran (pada pemilu 1955 dan pemilu 1999), menghadirkan implikasi negatif berupa jurang fragmentasi politik yang terlalu dalam antar partai politik. Dampaknya adalah sangat berpotensi terjadinya instabilitas politik yang berefek langsung ke dalam berbagai bidang kehidupan. Bahkan dampak yang paling buruk adalah terjadinya

permusuhan antara Islam dan negara sebagaimana yang sudah pernah terjadi di masa lalu, baik di era Orde Lama maupun era Orde Baru.

Sedangkan persoalan kedua (eksistensi politik umat Islam) dapat relevan dalam sistem demokrasi multi partai dengan cara menghilangkan dikotomi partai Islam dan non Islam, dan selanjutnya menjadikan partai politik secara umum sebagai alat dalam melakukan partisipasi politik umat Islam. Cara ini terasa lebih damai dan bersahabat sebab potensi fragmentasi partai politik tidak lagi berkuat pada seputar ideologi belaka, dan pada akhirnya preferensi politik umat Islam dalam melakukan partisipasi politik lebih berdasar kepada basis program dan pencapaian dari masing-masing partai politik sebagai lokomotif demokrasi. Sehingga dengan demikian manfaat yang diharapkan adalah terciptanya kohesi yang semakin kuat antara Islam dan negara dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi, dan selanjutnya terbentuk partisipasi politik umat Islam (eksistensi politik Islam) yang dapat memberikan kontribusi kuat bagi keberlangsungan sistem demokrasi multi partai saat ini dan masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Ghazi Zul, et.al, *Penyakit Partai Politik Penyakit Bangsa Indonesia*, wordpress.com. 20 Mei 2013.
- Dewanta, Awan S., dalam Riza Noer Arfani, "*Demokrasi Indonesia Kontemporer*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Dhakidae, Daniel, "*Partai-Partai Politik Indonesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi Dalam Patahan-Patahan Sejarah*", PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 1999.
- Duverger, Maurice, dalam Arbi Sanit, "*Sistem Politik Indonesia: Kestabilan-Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*", Rajawali Press, Jakarta, 1982.
- Duverger, Maurice, *Political Parties: Their Organization and Activities in Modern State*, Methuen, London, 1967. seperti dikutip oleh Zainal Muttaqin .wordpress.com/2009/08/20/.
- Effendy, Bahtiar, "*Teologi Baru Politik Islam*", Galang Press, Yogyakarta, 2001.
- Fanani, Ahmad Fuad, et.al, *Pluralitas Aspirasi Politik Umat Islam*, Koran SINDO, Kamis, 24 Oktober 2013, dalam wordpress.com.
- Feith, Herbert dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, London, The Free Press, 1960, Terjemahan Aswab Mahasin, *Abangan, Santri, dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983).

Information USA, Bureau of International Information Program, *What Is Democracy?*, Washington D.C, 2005. seperti dikutip oleh Zainal Muttaqin .wordpress.com/2009/08/20/.

Kirom, Syahrul, et.al, *Kebangkrutan Politik*, <http://www.shnews.com>. 25 September 2013.

Lapalombara, Joshep, and Myron Weiner, *The Origin and Development of Political Parties*, Princeton University Press, Princeton, 1966. seperti dikutip oleh Zainal Muttaqin .wordpress.com/2009/08/20/.

Lawson, *Political Parties*, Microsoft Encarta, Microsoft Corporation, Redmond WA, 2008. seperti dikutip oleh Zainal Muttaqin .wordpress.com/2009/08/20/.

Mahendra, Oka, *Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Tanpa penerbit, Jakarta, 2005. dalam Zainal Muttaqin .wordpress.com 20 Agustus 2009.

Maleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.

Mayo, Henry B., *an Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960.. seperti dikutip oleh Zainal Muttaqin .wordpress.com/2009/08/20/.

Moertopo, Ali, *Strategi Pembangunan Nasional*, Get II, CSIS, Jakarta, 1982... dalam Zainal Muttaqin .wordpress.com 20 Agustus 2009.

Nadli, Muhammad Abu, et.al, *Masa Depan Politik Islam*, Suara Karya, 11 Mei 2012, dalam wordpress.com.

Nazir, Mohammad, "*Metode Penelitian*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Ridwan, Muhammad Deden, dalam Nurcholis Madjid, "*Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*", Penyunting Muhammad Amin Akkas dan Hasan Muhammad Noer, PT Media Cita, Jakarta, 2001.

Rofik, A, et.al, *Marketing Politik dan Pemilih Rasional*, blogger.com, 17 Mei 2012.

Surbakti, Ramlan, dalam Umaruddin Masdar dkk, "*Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*", LKiS, Yogyakarta, 1999.

Tiarsa, Us, R, *Sistem Multi Partai*, dalam Putut Joko Utomo
blogspot.com/2011/05/.

Undang-Undang. No.2 Tahun 2008 Pasal 2 dan Pasal 11.

Urofsky, Michael I, *Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi*, dalam "*Demokrasi*",
Office of International Information Programs U.S. Departement of State, t.th.
seperti dikutip oleh Zainal Muttaqin .wordpress.com/2009/08/20/.

Wajdi, Farid, et.al, *Penyakit Ideologis dan Elitis Partai*, wordpress.com 17
February 2012.

Ying, Robert K, "*Studi Kasus: Disain dan Metode*", Rajawali Press, Jakarta,
2000.

<http://politik.kompasiana.com/2012/04/19/> *Politik Aliran (Islam Politik)*

Tamatkah?